



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan Rahmat dan Nikmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Evaluasi Rencana Kerja SKPD Tahun 2016 pada unit kerja Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016 merupakan informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi dalam pencapaian misi dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Bappeda Provinsi Lampung tahun 2016. Laporan ini selain untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja yang telah dilaksanakan pada Tahun 2016 juga dapat menjadi sumber informasi yang cukup untuk implementasi dan sasaran kerja, rencana anggaran dan rencana strategis pada tahun anggaran selanjutnya.

Semoga laporan ini dapat bermanfaat sebagai tolok ukur perbaikan kinerja Bappeda Provinsi Lampung dimasa yang akan datang. Akhir kata, saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya Evaluasi Hasil Rencana Kerja Bappeda Provinsi Lampung Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016.

**KEPALA BAPPEDA
PROVINSI LAMPUNG**

Ir. TAUFIK HIDAYAT, M.M., M.E.P



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
.....	
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
.....	
1.2. Gambaran Umum	3
.....	
1.3. Isu dan Permasalahan Penyelenggaraan Perencanaan Daerah.....	10
1.4. Tujuan dan Sasaran penyelenggaraan Perencanaan Daerah.....	11
1.5. Sistematika Penyusunan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Bappeda Provinsi Lampung	16
.....	
BAB II PERBANDINGAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA SKPD DAN RENSTRA SKPD	18
2.1. Program dan Kegiatan DPA TA. 2016	18
.....	
2.2. Kesesuaian Program dan Kegiatan Tahun 2016 dengan Renstra 2015 – 2019	21
.....	
2.3. Kesesuaian Alokasi Pendanaan di DPA dan Renstra.....	22
2.4. Perbandingan Indikator dan Target Kinerja antara Renstra dan DPA.....	25
BAB III CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016	39
3.1. Realisasi Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2016	39



3.2.	Capaian kinerja Sasaran Strategis Renstra	57
3.3.	Capaian Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2016 dibandingkan dengan Renstra	70
3.4.	Belanja Tidak Langsung	79
BAB IV	HAMBATAN DAN KENDALA SERTA TINDAK LANJUT	83
BAB V	PENUTUP	85
Lampiran		



DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	Sasaran Kinerja.....	14
TABEL 2.1	Program dan Kegiatan Belanja Langsung Tahun 2016	19
TABEL 2.2	Perbandingan pendanaan di Renstra dan DPA.....	23
TABEL 2.3	Perbandingan Indikator dan Target Renstra dan DPA.....	26
TABEL 3.1	Matrik Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan....	45
TABEL 3.2	Matrik Realisasi Capaian Kinerja Sasaran	57
TABEL 3.3	Pagu dan Realisasi Belanja Tidak Langsung.....	79



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Urusan pemerintahan dalam suatu daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Dalam amanat peraturan tersebut, pembagian urusan pemerintah daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang sepenuhnya merupakan kewenangan pemerintah daerah. Perencanaan pembangunan merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan pelayanan dasar pada tatalaksana pemerintahan daerah.

Proses perencanaan pembangunan mutlak diperlukan sebagai salah satu upaya menata daerah secara terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu pemerintah juga telah mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Undang-undang Nomor 25 tahun 2004. Dalam perencanaan pembangunan, pemerintah daerah harus mampu menjamin bahwa kegiatan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran. Dalam proses pembangunan, pemerintah sebagai induk dalam roda pemerintahan secara nasional membuat pedoman Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) periode 20 tahun yang merupakan pedoman capaian pembangunan yang disepakati oleh legislatif dan eksekutif serta seluruh stakeholder yang terlibat pada skala nasional. Selanjutnya RPJP tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang menjadi pedoman pemerintah daerah untuk mendukung RPJMN tersebut dalam wadah RPJP dan RPJMD Provinsi, Kabupaten dan Kota sampai pada perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk mengaplikasikan visi dan misi rencana pembangunan daerah.



Dalam rangka pencapaian sasaran dan prioritas bidang pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016, maka perlu adanya sinergitas antara RKPD dan Rencana Kerja (Renja) Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016. Untuk memastikan sinergitas antara dokumen perencanaan pembangunan, maka sesuai dengan Pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015, setiap SKPD di Provinsi Lampung diwajibkan untuk menyusun Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja SKPD Tahun 2016.

1.1.1. Dasar Hukum

Penyusunan Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja SKPD Provinsi Lampung Tahun 2016 dipedomani oleh beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun



2015-2019;

8. Surat Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Lampung Nomor 050/697/II.02/Sek/2014 tentang Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.

1.1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja SKPD pada Unit Kerja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016 adalah sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016.

Tujuan penyusunan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Bappeda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 antara lain :

1. Menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
2. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas target kerja yang telah dibuat dalam Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 dan Rencana Kerja Tahun 2016;
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Bappeda Provinsi Lampung untuk meningkatkan kinerja yang diamanatkan oleh Gubernur Lampung.

1.2. Gambaran Umum

1.2.1. Tugas Pokok Bappeda Provinsi Lampung

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 68 tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, secara umum Bappeda Provinsi Lampung mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang



perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan pemerintah kepada Gubernur serta tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian untuk pemantauan dan evaluasi kinerja program kegiatan yang bersumber dari dana APBD sesuai amanat Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2012 tentang Mekanisme dan Prosedur Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Program Pembangunan di Daerah dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

1.2.2. Fungsi Bappeda Provinsi Lampung

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 68 tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan bidang perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur di bidang perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan;
- e. Pelayanan administratif.



1.2.3. Arah Kebijakan Bappeda Provinsi Lampung

Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Bappeda Provinsi Lampung untuk mencapai tujuan. Kebijakan yang ditempuh adalah "Sinkronisasi, koordinasi, integrasi dan sinergi perencanaan dan implementasi pembangunan yang multi sektor dan multi ruang".

1.2.4. Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Lampung

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Lampung dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon II.a yaitu Kepala Badan. Tugas Kepala Bappeda adalah memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Bappeda dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan rumah tangga provinsi (desentralisasi) di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangannya serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Gubernur.

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Bappeda dibantu oleh seorang sekretaris dan 5 orang Kepala Bidang, 1 orang Kepala UPT dan beberapa kelompok jabatan fungsional dengan rincian satuan organisasi sebagai berikut:

1. Sekretariat melaksanakan tugas kesekretariatan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Bappeda Provinsi Lampung. Fungsi pelayanan pada sekretariat adalah sebagai berikut:
 - a. Penyusunan rencana kegiatan tahunan internal Bappeda;

- b. Perencanaan pengembangan sumberdaya aparatur Bappeda;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan; dan
- d. Pelaksanaan urusan administrasi umum dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang bertanggungjawab kepada Kepala Bappeda. Dalam menjalankan tugasnya, sekretaris dibantu oleh Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian Perencanaan.

2. Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pelaksanaan koordinasi kegiatan perencanaan, prediksi/ proyeksi dan analisis perekonomian daerah, pengembangan dan evaluasi pembangunan yang berkaitan dengan sektor produksi (pertanian tanaman pangan dan hortikultura, kelautan dan perikanan, peternakan, perkebunan, industri, pertambangan dan energi), keuangan dan pendapatan daerah, perdagangan, jasa dan pemasaran, pariwisata, kebudayaan, penanaman modal, promosi dan pengembangan dunia usaha (skala besar, menengah, kecil dan koperasi).

Bidang Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bappeda. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan dibantu oleh Kepala Sub Bidang Produksi, Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Keuangan dan Kepala Sub Bidang Pembangunan dan Promosi.

3. Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan prasarana dan sarana bidang pekerjaan umum, perhubungan, penataan ruang dan pengembangan wilayah serta pendayagunaan sumber daya alam lainnya dan pelestarian lingkungan hidup.

Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bappeda. Dalam



menjalankan tugasnya Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana Wilayah dibantu oleh Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah, Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup dan Kepala Sub Bidang Tata Ruang.

4. Bidang Pengendalian mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pengendalian kegiatan pembangunan di daerah, memonitor pelaksanaannya, melakukan pengumpulan, pengolahan dan analisis data statistik, monitoring dan pelaporan serta evaluasi program pembangunan daerah jangka panjang, menengah dan tahunan.

Bidang Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bappeda. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bidang Pengendalian dibantu oleh Kepala Sub Bidang Data Statistik, Kepala Sub Bidang Monitoring dan Pelaporan dan Kepala Sub Bidang Evaluasi.

5. Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas pelaksanaan analisis dan merumuskan rancangan kebijakan pembangunan, koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan serta berperan aktif dalam pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pembangunan di bidang pengembangan sumber daya manusia, pemerintahan, kesejahteraan rakyat (kesehatan, pembangunan masyarakat desa, sosial, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keagamaan), kependudukan dan tenaga kerja, hukum dan keamanan serta ketertiban masyarakat.

Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bappeda. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bidang Sosial Budaya dibantu oleh Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum, Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Tenaga Kerja dan Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat.

6. Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pelaksanaan analisis dan merumuskan rancangan kebijakan pembangunan, koordinasi kegiatan perencanaan pembangunan serta berperan aktif dalam



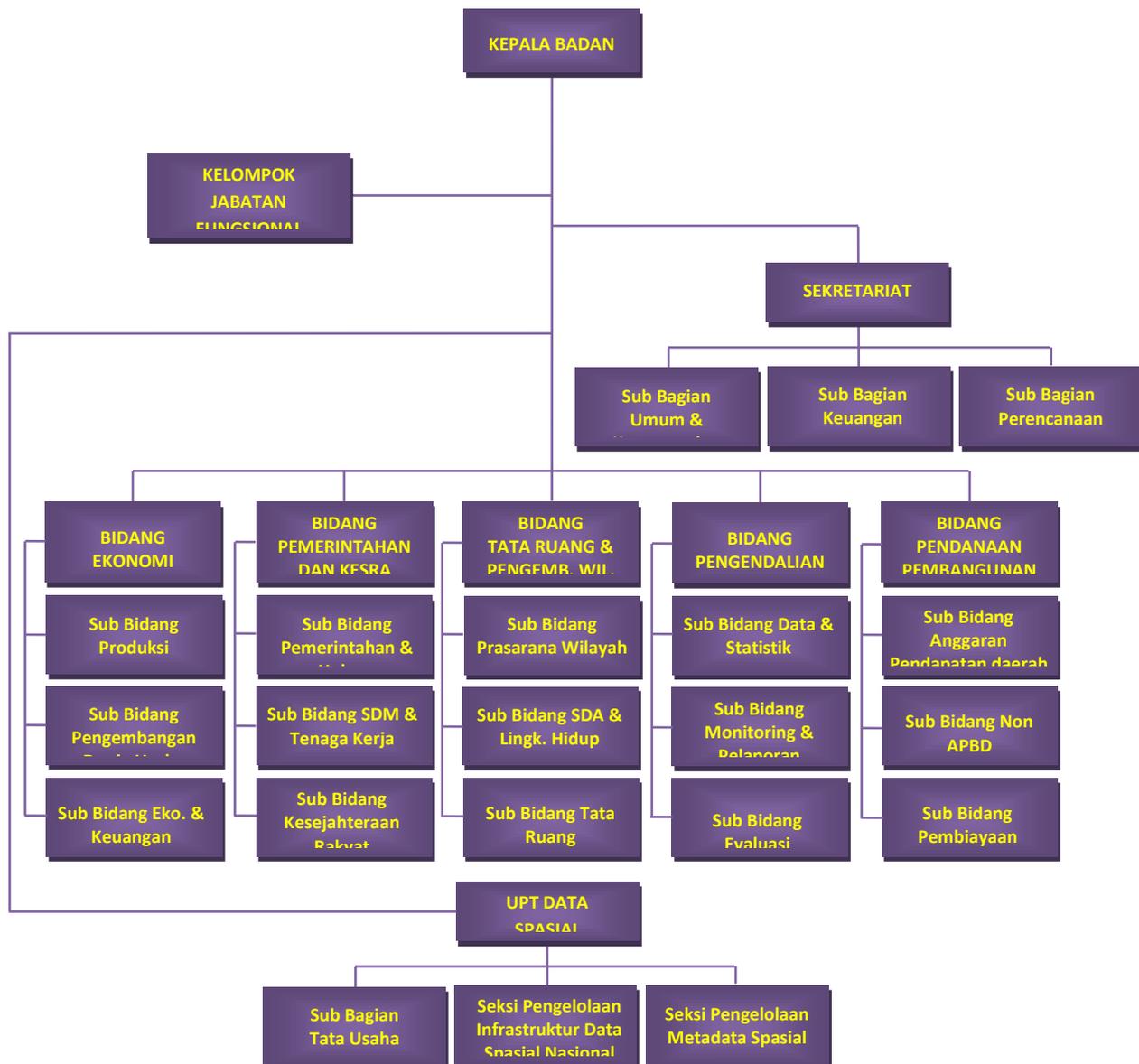
pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan daerah. Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab kepada Kepala Bappeda. Dalam menjalankan tugasnya Kepala Bidang Penelitian dibantu oleh Kepala Sub Bidang Pengembangan Perekonomian dan Keuangan, Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Masyarakat dan Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Teknologi.

7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Data Spasial mempunyai tugas pokok dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan data spasial tertentu.

UPT Pengelolaan Data Spasial dipimpin oleh seorang kepala UPT yang bertanggungjawab kepada Kepala Bappeda. Dalam menjalankan tugasnya Kepala UPT Pengelolaan Data Spasial dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pengelolaan Metadata Spasial dan Kepala Seksi Pengembangan Infrastruktur Data Spasial Nasional.

Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Lampung berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 33 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung disajikan dalam Gambar 1.1 berikut ini :

**Gambar 1.1. Struktur Organisasi
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
(Peraturan Gubernur Lampung Nomor 68 Tahun 2014)**



1.3. Isu dan Permasalahan Penyelenggaraan Perencanaan Daerah.

Identifikasi isu dan permasalahan dalam penyelenggaraan perencanaan daerah dapat dilihat dari 4 aspek, antara lain adalah :

1. Aspek Penguatan Jaringan dan Koordinasi Perencanaan
 - a. Belum optimalnya koordinasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - b. Koordinasi dan sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan sektor swasta sebagai mitra pemerintah belum optimal, seperti halnya dalam sinergi pelaksanaan CSR/PKBL antara swasta dan Pemprov Lampung.
2. Aspek Pengembangan Data, Informasi, dan Teknologi untuk Perencanaan
 - a. Pengelolaan website sebagai media untuk mempublikasikan kinerja dan hasil-hasil pelaksanaan tugas, serta menjangkau aspirasi dari masyarakat dirasakan belum optimal.
 - b. Belum optimalnya kompilasi dan publikasi data untuk menghasilkan output publikasi data yang terpadu dan menyeluruh sebagai bahan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan.
 - c. Belum optimalnya ketersediaan dan pemanfaatan data serta informasi pembangunan yang akurat dan akuntabel.
3. Aspek Penyusunan dan Pengembangan Dokumen Perencanaan
 - a. Dokumen RPJMD Tahun 2015—2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (5 tahun) yang memuat program-program prioritas pembangunan hanya dari sumberdana APBD Provinsi Lampung, sesuai ketentuan yang berlaku. Padahal kenyataannya pelaksanaan pembangunan di daerah tidak hanya berasal dari dana APBD Provinsi saja, tetapi juga dari dana APBN dan investasi swasta. Maka untuk lebih mengoptimalkan perencanaan pembangunan di Provinsi Lampung



perlu disusun dokumen-dokumen perencanaan yang mendukung atau melengkapi RPJMD.

- b. Masih adanya inkonsistensi antara dokumen perencanaan (RPJMD dan RKPD) dengan dokumen anggaran (KUA/PPAS dan APBD).
- c. Masih terbatasnya kajian strategis, analisis dan studi lapangan yang terkini dalam mendukung proses perencanaan dan penentuan kebijakan pembangunan daerah.

4. Aspek Monitoring, Pelaporan, dan Evaluasi Pembangunan

Belum optimalnya pemanfaatan hasil pemantauan, pengendalian, dan evaluasi sebagai bahan referensi (*feedback*) dalam proses perencanaan.

1.4. Tujuan dan Sasaran penyelenggaraan Perencanaan Daerah.

Pada periode Renstra 2015 – 2019, mengacu pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, visi dan misi Renstra mengikuti visi dan misi Gubernur yang teruang dalam RPJMD Provinsi Lampung periode 2015 – 2019. Visi Lampung yaitu : “ **LAMPUNG MAJU DAN SEJAHTERA 2019**”. Visi tersebut dimaksudkan untuk menjadikan Provinsi Lampung merupakan daerah yang maju dan berdaya saing. Menjadi wilayah maju mempunyai pengertian Provinsi Lampung menjadi daerah dengan kinerja ekonomi tinggi dimana untuk menjadi daerah yang maju harus di dukung dengan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya yang tinggi akan didapatkan bila status kesehatan masyarakat Provinsi Lampung juga tinggi. Menjadi wilayah sejahtera mempunyai pengertian bahwa masyarakat Provinsi Lampung yang sejahtera dalam arti sejahtera secara ekonomi, makmur dengan pembagian yang lebih adil dan merata, jumlah penduduk terkendali, derajat kesehatan tinggi, angka harapan hidup tinggi, kualitas pelayanan sosial lebih baik. Masyarakat sejahtera juga harus terjamin hak-haknya dan memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan hidup, memperoleh pekerjaan, pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial serta kebutuhan dasar yang layak.



Untuk mewujudkan Visi Lampung tersebut maka telah dirumuskan menjadi 5 (lima) misi yaitu :

1. Meningkatkan Pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah;
2. Meningkatkan infrastruktur untuk pengembangan ekonomi dan pelayanan sosial;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi, budaya masyarakat, dan kehidupan beragama yang toleran;
4. Meningkatkan pelestarian SDA dan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan sosial, dan memantapkan pemerintahan yang baik dan antisipatif.

Sektor perencanaan pembangunan daerah mendukung pencapaian misi ke-5 yaitu : “Menegakkan supremasi hukum, mengembangkan demokrasi berbasis kearifan sosial, dan memantapkan pemerintahan yang baik dan antisipatif” dengan tujuan Memperkuat Kapasitas Manajemen Birokrasi. Sasaran strategis yang akan dicapai adalah Meningkatnya kinerja pelayanan publik yang memuaskan masyarakat dan kualitas pelayanan yang merata dengan indikator kinerja sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD 2015 – 2019 adalah terwujudnya konsistensi antar dokumen perencanaan.

Mengacu pada Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah kebijakan Provinsi Lampung yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung, Renstra BAPPEDA Provinsi Lampung tahun 2015 – 2019 menjabarkan tujuan dan sasaran penyelenggaraan perencanaan daerah.

Tujuan Penyelenggaraan perencanaan BAPPEDA Provinsi Lampung adalah :

1. Memperkuat kelembagaan Bappeda sebagai lembaga perencanaan profesional.

2. Meningkatnya sinkronisasi, koordinasi, integrasi dan sinergi dalam proses perencanaan dan implementasi pembangunan daerah.
3. Meningkatkan kualitas perencanaan melalui pengembangan kajian/analisis kebijakan guna mendukung pencapaian misi RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019.
4. Meningkatkan kualitas pengendalian, evaluasi kebijakan dan pelaksanaan hasil-hasil pembangunan daerah guna mendukung perencanaan pembangunan daerah.
5. Meningkatkan kualitas, ketersediaan dan kemudahan aksesibilitas data dan informasi perencanaan pembangunan bagi masyarakat.

Adapun sasaran Penyelenggaraan perencanaan BAPPEDA Provinsi Lampung dalam rangka pencapaian target Renstra sampai dengan akhir tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas dan proses penyusunan dokumen perencanaan tahunan sesuai jadwal dan peraturan yang berlaku dengan capaian sebesar 100%.
2. Meningkatnya sinergi perencanaan antara SKPD provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah pusat serta seluruh stakeholders pembangunan dengan capaian sebesar 100%.
3. Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian/analisis kebijakan perencanaan dalam implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 2015-2019 dengan capaian sebesar 100%.
4. Meningkatnya kualitas Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah dengan capaian sebesar 100%.
5. Optimalisasi keterisian data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan terintegrasi sebesar 100%.

Sasaran yang akan dicapai pada tahun 2015 sebagai tahun 1 (pertama) pelaksanaan Renstra 2015 - 2019 adalah sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 1.1 Sasaran Kinerja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015-2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Meningkatnya kualitas dan proses penyusunan dokumen perencanaan tahunan sesuai jadwal dan peraturan yang berlaku.	Persentase konsistensi Program RKPD dengan Program RPJMD;	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase konsistensi Program KUA PPAS dengan RKPD;	90%	95%	100%	100%	100%
2. Meningkatnya sinergi perencanaan antara SKPD provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah pusat serta seluruh stakeholders pembangunan.	Kesesuaian antara prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung dan prioritas Pemerintah pusat;	90%	95%	100%	100%	100%
3. Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian/analisis kebijakan perencanaan dalam implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 2015-2019.	Persentase analisis kebijakan perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan	90%	95%	100%	100%	100%
4. Meningkatnya kualitas Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah.	Persentase SKPD melaporkan hasil evaluasi Renja SKPD sesuai dengan ketentuan	70%	80%	90%	100%	100%
5. Optimalisasi keterisian data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan terintegrasi.	Persentase keterisian data dan informasi perencanaan pembangunan (SIPD)	20%	50%	75%	100%	100%

1.5. Sistematika Penyusunan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Bappeda Provinsi Lampung

Sistematika penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015. Evaluasi Hasil Rencana Kerja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, sistematika penyusunan serta gambaran umum Bappeda Provinsi Lampung.

Bab II. Perbandingan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015-2019

Menguraikan tentang Program dan Kegiatan pada Rencana Kerja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016, kesesuaian program, pagu pendanaan, indikator dan target kinerja Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.

Bab III. Capaian Kinerja Bappeda Provinsi Lampung

Menguraikan tentang capaian kinerja keuangan dan kinerja output kegiatan dibandingkan dengan target Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019.



Bab IV. Hambatan dan Kendala

Menguraikan resume umum tentang hambatan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 serta rencana tindak lanjutnya.

Bab V. Penutup

Menguraikan simpulan dan rekomendasi atas pelaksanaan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016.



DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Lampung.....	9
GAMBAR 3.1	Irisan Kesesuaian Program RKPD dengan RPJMD	59
GAMBAR 3.2	Irisan Kesesuaian Program RKPD dengan PPAS	60
GAMBAR 3.3	Pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung 2014 - 2016.....	47
GAMBAR 3.4	Persentase Penduduk Miskin 2011 - 2016	64
GAMBAR 3.5	Tingkat Pengangguran Terbuka 2014 - 2016.....	65
GAMBAR 3.6	Web Bappeda Provinsi Lampung.....	80
GAMBAR 3.7	Website E-Monev Bappeda Provinsi Lampung.....	81
GAMBAR 3.8	Website Metadata Spasial Daerah.....	82
GAMBAR 3.9	Website Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan.....	82



BAB II

PERBANDINGAN PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA TAHUN 2016 DAN RENSTRA 2015-2019 BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG

2.1. Program dan Kegiatan Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016

Program Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016. Pada bulan November 2016, Pemerintah Provinsi Lampung mengeluarkan kebijakan perubahan anggaran Tahun 2016 dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tanggal 17 November 2016 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016. Sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung, Program dan Kegiatan Bappeda Provinsi Lampung pada Tahun Anggaran 2016 terdiri dari :

- a. APBD Murni Tahun 2016
 - Program : 14 program
 - Kegiatan : 82 kegiatan
 - Pagu : Rp. 14.700.000.000,-
- b. APBD Perubahan Tahun 2016

- Program : 14 program
- Kegiatan : 82 kegiatan
- Pagu : Rp. 14.254.228.115,-

Pada Anggaran Perubahan Tahun 2016, terdapat penataan dan efisiensi anggaran kegiatan. Jumlah efisiensi anggaran pada Perubahan APBD Tahun 2016 sebesar Rp. 445.771.885,-. Adapun rincian program dan kegiatannya adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Program dan Kegiatan Belanja Langsung
Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016**

I. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	
1.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.	Penyediaan jasa administrasi keuangan
3.	Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
5.	Penyediaan alat tulis kantor
6.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7.	Penyediaan peralatan rumah tangga
8.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9.	Penyediaan makanan dan minuman
10.	Penyediaan jasa administrasi teknis perkantoran
11.	Penyediaan jasa keamanan kantor dan rumah jabatan
12.	Pengembangan pengelolaan keuangan SKPD
13.	Penata Usahaan Aset Daerah
14.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi
II. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
2.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.	Peningkatan fasilitas gedung kantor
III. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
IV. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	
1.	Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
2.	Evaluasi Pengembangan Budaya Kerja
V. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	
1.	Pembangunan data base metadata spasial
2.	Pengelolaan Informasi Elektronik dan Perpustakaan Bappeda Prov. Lampung
3.	Penyusunan bahan Publikasi Profil Pembangunan Provinsi Lampung

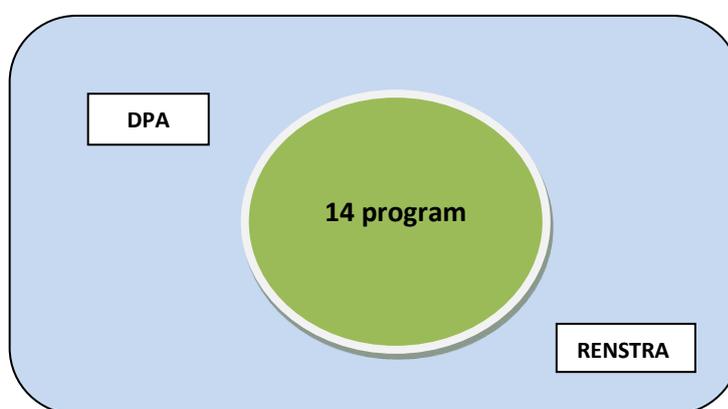
4.	Pengelolaan Simpul Jaringan Data Spasial Nasional
5.	Padu serasi informasi geospasial Provinsi Lampung
6.	Penyusunan Data Indikator Kinerja Pemerintah Daerah
7.	Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional (Siskurtanas)
8.	Koordinasi Data dan Informasi Pembangunan Daerah
9.	Penyusunan Data Indikator Utama Ekonomi Makro dan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
10.	Koordinasi Pengelolaan data dan informasi geospasial Provinsi Lampung
VI. PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	
1.	Penyusunan dan Legalisasi RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah (RTRKS/RDTR/KSCT) Provinsi Lampung
2.	Fasilitasi dan koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD).
VII. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	
1.	Rapat Koordinasi Gubernur se Wilayah Sumatera
VIII. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
1.	Pembinaan SDM Aparatur
IX. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUNAN	
1.	Forgab SKPD dan Musrenbang Provinsi
2.	Penyusunan RKPD 2016
3.	Rapat koordinasi dan Konsultasi Perencanaan
4.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Bappeda Provinsi Lampung
5.	Informasi Perencanaan Pembangunan Terpadu (IPPT)
6.	Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kab/Kota
7.	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Perencanaan Online
8.	Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran (KUA/PPAS dan PRA RKA APBD P 2016-2017)
9.	Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah
10.	Pembinaan Penyusunan RKPD Kab/Kota
11.	Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah
12.	Fasilitasi kegiatan Musrenbang Nasional
X. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN	
1.	Sosialisasi dan Publikasi Perencanaan Pembangunan
XI. PROGRAM PENGUATAN JARINGAN DAN PROGRAM KOORDINASI PERENCANAAN	
1.	Koordinasi perencanaan pengembangan ekonomi daerah Provinsi Lampung
2.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Kesra
3.	Koordinasi Perencanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembangunan daerah
4.	Koordinasi Perencanaan Praswil, Tata Ruang dan LH
5.	Promosi Informasi Perencanaan Investasi Daerah
6.	Koordinasi dan asistensi pemanfaatan dana pajak rokok
7.	Koordinasi Rencana Aksi Daerah tentang penurunan Gas Rumah Kaca dan antisipasi dampak perubahan Iklim dan Monev lahan kritis (Koordinasi dan Monev LH)
8.	Penunjang Program Pengelolaan Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi (WISMP-II) Provinsi Lampung

9.	Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi Provinsi Lampung
10.	Fasilitasi kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL, Koordinasi Kawasan Kumuh/Tertinggal, Perumahan serta Pemukiman
11.	Fasilitasi percepatan pelaksanaan program unggulan daerah bidang infrastruktur
12.	Koordinasi Monitoring pelaporan dan evaluasi Bidang Pengendalian
13.	Fasilitasi Sekretariat Tim Penganggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Lampung
XII. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN FASILITASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	
1.	Fasilitasi dan koordinasi Pemanfaatan anggaran DBHCHT untuk pengembangan sektor Perkebunan
2.	Fasilitasi Percepatan Pengembangan Kawasan Industri dan Pariwisata
3.	Fasilitasi dan koordinasi kedaulatan pangan dan peralihan kewenangan bidang energi dan kemaritiman
4.	Fasilitasi dan Koordinasi Program Pembangunan Mendukung Kedaulatan Pangan dan energi
5.	Fasilitasi Pengembangan Dunia Usaha dan Sinergitas Pembangunan Ekonomi Daerah
6.	Fasilitasi Analisis Kebijakan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat.
7.	Penyusunan Road Map Peningkatan IPM Provinsi Lampung
XIII. PROGRAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
1.	Evaluasi hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan SKPD Prov.Lampung
2.	Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda
3.	Penyusunan Laporan Pasca-MDGs provinsi Lampung 2011-2015 akhir capaian
4.	Peningkatan, pengendalian, monitoring dan pelaporan pelaksanaan pembangunan APBN (DK/TP/TA. 2015-2019
5.	Fasilitasi dan Pembinaan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Kab/Kota
6.	Peningkatan, pengendalian, monitoring dan pelaporan pelaksanaan pembangunan APBD TA 2016
7.	Koordinasi dan Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
8.	Evaluasi hasil pencapaian renstra & renja bappeda
XIV. PROGRAM PENGEMBANGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
1.	Fasilitasi penyelarasan RPJMN dan integrasi Undang-undang 23 tahun 2014 kedalam RPJMD Prov. Lampung 2015-2019
2.	Penyusunan Studi Pendahuluan Rencana Kerja Kemitraan Pembiayaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota
3.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pasca MDGs (SDGs)
4.	Penyusunan RAD Pangan dan Gizi 2015-2019
5.	Program Penyusunan Grand Design Kependudukan Provinsi Lampung
6.	Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek Infrastruktur Untuk Kerjasama Pemerintah dan Swasta

2.2. Kesesuaian Program dan Kegiatan Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015-2019

Untuk mendukung Misi ke-5 dari RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019 terdapat 5 sasaran Strategis dalam Renstra 2015 – 2019 Bappeda Provinsi

Lampung dan 1 sasaran pendukung dengan melaksanakan 14 Program dan 82 Kegiatan. Seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016 terdapat dalam matrik program dan kegiatan yang ada dalam Dokumen Rencana Strategis Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015-2019. Konsistensi Program dan kegiatan antara RPJMD, Renstra dan RKPD diperkuat dengan adanya aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Provinsi Lampung. Diharapkan tidak ada lagi program dan kegiatan diluar dokumen RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 dan Renstra SKPD Tahun 2015-2019. Program-program yang sifatnya baru dan dibutuhkan akan dikoordinasikan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.



Gambar 2.1 Irisan Kesesuaian Program DPA terhadap Renstra Tahun 2016

Dari gambar 2.1 dapat diketahui bahwa seluruh program yang ada dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2016 seluruhnya sudah sesuai dengan program yang ada pada Renstra Bappeda Provinsi Lampung 2015-2019. Kesesuaian Program dan Kegiatan Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015-2019, sehingga dapat dikatakan tingkat kesesuaian program sebesar 100%.

2.3 Kesesuaian Alokasi Pendanaan di DPA dan Renstra

Pada tahun 2016, pagu anggaran Belanja Langsung Bappeda Provinsi Lampung sebesar Rp. 14.254.228.115,- sementara dalam Renstra tahun 2016



direncanakan sebesar Rp. 20.500.000.000,-. Rincian alokasi anggaran per program dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

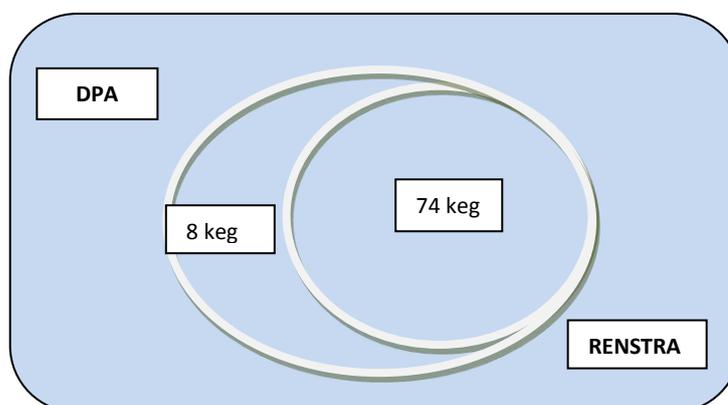
Tabel 2.2 Perbandingan Pendanaan di Renstra dan DPA tahun 2016

NO	PROGRAM	PAGU ANGGARAN RENSTRA (Rp)	PAGU ANGGARAN DPA (Rp)	%
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.050.000.000	1.835.797.000	89,6
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	725.000.000	914.400.000	126,10
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	70.000.000	52.000.000	74,3
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	235.000.000	144.554.000	61,5
5.	Program Pengembangan Data/Informasi	1.725.000.000	1.132.842.500	65,7
6.	Program Perencanaan Tata Ruang	125.000.000	964.264.000	771,4
7.	Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	2.000.000.000	2.000.000.000	100
8.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	224.000.000	99.143.000	44,3
9.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan	2.300.000.000	1.931.068.750	84,0
10.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan	100.000.000	102.200.000	102,2
11.	Program Penguatan Jaringan dan Program Koordinasi Perencanaan	2.186.000.000	2.237.073.500	102,3
12.	Program Pengembangan dan Fasilitasi Kebijakan Pembangunan Daerah	1.875.000.000	969.000.000	51,7
13.	Program Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	1.435.000.000	1.053.602.000	73,4
14.	Program Pengembangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	5.550.000.000	818.283.365	14,7
	TOTAL	20.500.000.000	14.254.228.115	69,50

Sumber : Bappeda Provinsi Lampung, 2016

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa dari 14 program terdapat 3 Program yang pagu anggaran DPA nya diatas pagu anggaran Renstra dan 11 Program dibawah pagu Renstra nya. Hal ini dikarenakan adanya antara lain untuk efisiensi anggaran. Efisiensi dilakukan dengan penghematan belanja khususnya belanja perjalanan dinas, ATK dan belanja lain yang nilai urgensi nya tidak begitu prioritas untuk segera dilaksanakan. Beban Pemerintah provinsi untuk membayar tunggakan Dana bagi hasil pajak ke kabupaten/kota juga memberikan tekanan terhadap besaran alokasi belanja ke Satuan kerja. Pada pertengahan tahun 2016, pemerintah pusat mengambil kebijakan untuk menunda pembayaran DAU ke daerah sehingga memaksa daerah untuk mengalokasikan belanja yang benar-benar prioritas.

Hasil identifikasi kegiatan-kegiatan yang ada di DPA dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Renstra dapat diketahui terdapat 8 kegiatan yang tidak masuk dalam kegiatan Renstra Tahun 2016, Namun demikian, kegiatan tersebut berdasarkan analisis kebutuhan diperlukan dalam rangka mendukung kebijakan dan pencapaian sasaran daerah.



Gambar 2.2 Irisan Kesesuaian Kegiatan DPA terhadap Renstra Tahun 2016

Berdasarkan Gambar 2.2, dapat dijelaskan bahwa 12 kegiatan tidak ada dalam Renstra bappeda 2015-2019. Ke 8 (delapan) kegiatan tersebut adalah 1) Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja, 2) Penyediaan alat tulis kantor, 3)



Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, 4) Penyediaan peralatan rumah tangga, 5) Penyediaan peralatan rumah tangga, 6) Penyediaan makanan dan minuman, 7) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, dan 8) Peningkatan fasilitas gedung kantor. 8 (delapan) kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin dan hasil penyesuaian nomenklatur kegiatan yang ada dalam Permendagri 54 Tahun 2010 yang kemudian masuk dalam kegiatan 2016. Terkait hal tersebut, Renstra Bappeda perlu segera di revisi.

2.4 Perbandingan Indikator dan Target Kinerja antara Renstra dan DPA Bappeda Provinsi Lampung

Perencanaan Pembangunan di Provinsi Lampung Tahun 2016 merupakan tahun ke-2 periode RPJMD Provinsi Lampung 2015-2019 dan Renstra Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015-2019. Secara singkat target kinerja antara Renstra dan DPA Bappeda Provinsi Lampung tahun 2016 dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 2.3 Perbandingan Indikator dan Target Kinerja DPA dan Renstra Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENSTRA		DPA	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
I.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya pelayanan administarasi perkantoran	100%	2.050.000.000	100%	1.835.797.000
1.	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya Kebutuhan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	550.000.000	12 Bulan	500.000.000
2.	Penyedia jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya Administrasi Keuangan	12 Bulan	150.000.000	12 Bulan	146.900.000
3.	Penyedia jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	130.000.000	12 Bulan	120.000.000
4.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya jasa perbaikan alat kantor	-	-	100 %	50.000.000
5.	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	-	-	12 Bulan	34.000.000
6.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetakan dan penggandaan berupa Buku masuk/keluar, Buku BA Barang	-	-	31 Buku	25.000.000
7.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tercapainya Kebutuhan Alat-Alat rumah Tangga Kantor Bappeda Provinsi Lampung	-	-	12 Bulan	28.650.000
8.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya Bahan-bahan Bacaan Bappeda Provinsi	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	51.747.000
9.	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum harian, rapat dan tamu kantor Bappeda	-	-	12 Bulan	25.000.000
10.	Penyediaan jasa Tenaga Pendukung	Terpenuhinya Pembayaran Tenaga Kontrak Kantor Bappeda	9 Orang	150.000.000	9 Orang	152.100.000

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENSTRA		DPA	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
	Administrasi/Teknis perkantoran	Provinsi Lampung				
11.	Penyediaan jasa keamanan kantor dan rumah jabatan	Terpenuhinya jasa keamanan kantor	-	-	6 Orang	90.900.000
12.	Pengembangan pengelolaan keuangan SKPD	Tersedianya dokumen capaian Laporan Keuangan	1 Dok	125.000.000	1 Dok	146.500.000
13.	Penata Usahaan Aset Daerah	Tersusunnya data Inventaris barang berupa Dokumen KIR, KIB, Daftar Inventaris Barang, Penghapusan Barang, dan Sensus Barang	5 Dok	50.000.000	5 Dok	40.000.000
14.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	45 Kali	600.000.000	45 Kali	425.000.000
II.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	725.000.000	100%	914.400.000
1.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terpenuhinya pengadaan sarana kantor	85%	125.000.000	100%	364.400.000
2.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	-	0	100%	80.000.000
3.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tercapainya Perawatan Kendaraan Dinas secara rutin dan berkala	20 Buah	400.000.000	20 Buah	330.000.000

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENSTRA		DPA	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
4.	Peningkatan fasilitas gedung kantor	Terpenuhinya fasilitas gedung kantor	-	0	100%	140.000.000
III.	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	70.000.000	100%	52.000.000
1.	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas pegawai Bappeda Provinsi Lampung	160 stel	70.000.000	130 Stel	52.000.000
IV.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	235.000.000	100%	144.554.000
1.	Pendidikan dan pelatihan Aparatur	Terlaksananya Bimbingan Teknis pendidikan aparatur	100 Orang	150.000.000	50 Orang	92.394.000
2.	Evaluasi Pengembangan Budaya Kerja	Terpenuhinya laporan evaluasi pengembangan budaya kerja, pembinaan kinerja aparatur serta sosialisasi kinerja aparatur	1 Dok	85.000.000	1 Dok, 4 kali rapat, 1 kali	52.160.000
V.	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI	Terbangunnya sistem data/informasi pembangunan daerah	100%	1.725.000.000	100%	1.132.842.500
1.	Pembangunan Database Metadata Spasial	Terlaksananya koordinasi ke Pemerintah pusat dan Kab/ Kota, terpenuhinya jumlah peserta pelatihan Drone	-	-	17 Kali, 10 Orang	138.796.000
2.	Pengelolaan Informasi Elektronik dan Perpustakaan Bappeda Provinsi Lampung	Updating website dan data penunjang, terlaksananya koordinasi ke Pusat	1 Kali	150.000.000	1 Kali, 3 Kali	83.901.500

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENSTRA		DPA	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
3.	Penyusunan bahan Publikasi Profil Pembangunan Provinsi Lampung	Tersediannya bahan publikasi profil pembangunan Provinsi Lampung	3 Panel display data, 100 buku saku profil Lampung	100.000.000	3 Panel display data, 100 buku saku profil Lampung	65.000.000
4.	Pengelolaan Simpul Jaringan Data Spasial Nasional	Kelancaran akses arus data pada jaringan informasi geospasial Nasional	1 Tahun	150.000.000	1 Tahun, 1 Paket, 17 Rapat	135.011.000
5.	Padu serasi informasi geospasial Provinsi Lampung	Terlaksananya Rapat Koordinasi terkait informasi Geospasial	17 Rapat	200.000.000	17 Rapat	104.750.000
6.	Penyusunan Data Indikator Kinerja Pemerintah Daerah	Tersedianya buku indikator kinerja Pemerintah, buku Lampung dalam angka tahun 2015	75 buku DIKP, 25 buku LDA	400.000.000	75 buku DIKP, 25 buku LDA	218.375.000
7.	Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional (Siskurtanas)	Updating data Siskurtanas Provinsi Lampung	1 dok (8 gatra)	75.000.000	1 dok (8 gatra)	50.000.000
8.	Koordinasi Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Terisinya data sistem informasi pembangunan daerah secara online (SIPD-online)	1 Aplikasi	150.000.000	1 Aplikasi	85.245.000
9.	Penyusunan Data Indikator Utama Ekonomi Makro dan Keuangan Daerah Provinsi Lampung	Buku Statistik ekonomi makro Provinsi Lampung	120 Buku	100.000.000	120 Buku	100.000.000
10.	Koordinasi Pengelolaan data dan informasi geospasial Provinsi Lampung	Terlaksananya Rapat ke Pemerintah Pusat dan Kab/ Kota, terpenuhinya pelatihan pengelolaan data	-	-	19 Rapat, 25 Orang	151.764.000
VI.	PROGRAM	Persentase pemenuhan	100%	125.000.000	100%	964.264.000

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENSTRA		DPA	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
	PERENCANAAN TATA RUANG	dokumen Perencanaan Penataan Ruang				
1.	Penyusunan dan Legalisasi RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah (RTRKS/RDTR/KSCT) Provinsi Lampung	Terevaluasinya revisi Dokumen RTRW Tahun 2009-2029 dan terlaksananya konsultasi publik	1 Dok	750.000.000	2 Dok	819.810.000
2.	Fasilitasi dan koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	Koordinasi dan konsolidasi BKPRD Prov. Lampung	1 Dok	125.000.000	1 Dok	144.454.000
VII.	PROGRAM KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	Persentase peningkatan kerjasama antar Pemerintah Daerah	100%	2.000.000.000	100%	2.000.000.000
1.	Rapat Koordinasi Gubernur se Wilayah Sumatera	Pelaksanaan rapat koordinasi Gubernur se-Wilayah Sumatera	1 Kali	2.000.000.000	1 Kali	2.000.000.000
VIII.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Peningkatan Kapasitas kelembagaan perencanaan	100%	224.000.000	100%	201.343.000
1.	Pembinaan SDM Aparatur	Terlaksananya aktifitas olahraga dan ceramah agama sebagai sarana pembinaan pegawai Bappeda Provinsi Lampung	80 Kali	124.000.000	48 Kali, 54 Kali	99.143.000
VII.	PROGRAM	Persentase Pelaksanaan	100%	2.300.000.000	100%	1.931.068.750

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENSTRA		DPA	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUNAN	Perencanaan Daerah dan Bappeda Sesuai Dengan Perundang-undangan				
1.	Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Provinsi	Pelaksanaan forum gabungan SKPD dan pelaksanaan Musrenbang Provinsi	2 Kali	425.000.000	2 Kali	357.356.000
2.	Penyusunan RKPD 2016	Dokumen RKPD Provinsi Lampung	-	-	2 Dok	150.650.000
3.	Rapat koordinasi dan konsultasi perencanaan	Mengakomodasi sinkronnya Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Koordinasi bidang perencanaan	5 Kali	125.000.000	5 kali, 7 Kali	50.000.000
4.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Bappeda Provinsi Lampung	Tersusunnya Dokumen Renja, PPAS, RKA, dan DPA Bappeda	3 Dok	100.000.000	3 Dok	61.000.000
5.	Informasi Perencanaan Pembangunan Terpadu (IPPT)	Terlaksananya informasi perencanaan pembangunan terpadu (pameran pembangunan)	1 Kali	275.000.000	1 Kali	200.000.000
6.	Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang kab/kota	Terlaksananya Musrenbang Kab/Kota se-Prov. Lampung	15 Kab/Kota	100.000.000	15 Kab/Kota	95.655.300
7.	Pembangunan dan Pengembangan Sistem Perencanaan Online	Terpeliharanya dan updating sistem perencanaan pembangunan daerah (SIPPD) Provinsi Lampung	1 Tahun	125.000.000	1 Tahun	274.200.000
8.	Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran (KUA/PPAS dan PRA RKA APBD P 2016-2017)	Dokumen KUA/PPAS APBD P 2016-2017	200 Eks	300.000.000	2 Dok KUA 2016, 2 Dok PPAS 2016	214.725.000

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENSTRA		DPA	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
9.	Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya workshop perencanaan pembangunan Daerah	1 Kali	250.000.000	1 Kali	162.944.650
10.	Pembinaan Penyusunan RKPD Kab/Kota	Terlaksananya pembinaan RKPD Kab/Kota	15 Kab/Kota	75.000.000	15 Kab/Kota	60.000.000
11.	Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen pemetaan masalah, potensi, agenda strategis pembangunan daerah serta pengendalian dan evaluasi program-program unggulan	1 Dok	75.000.000	2 Dok	207.470.000
12.	Fasilitasi kegiatan Musrenbang Nasional	Partisipasi Prov.Lampung dalam rangkaian kegiatan Musrenbang Nasional tahun 2016	3 Kali	200.000.000	1 Kali	97.067.800
VIII.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN	Persentase Peningkatan Kapasitas kelembagaan perencanaan	100%	224.000.000	100%	201.343.000
1.	Sosialisasi dan Publikasi Perencanaan Pembangunan	Terpenuhinya publikasi kegiatan Bappeda berupa Advertorial, Iklan Media Cetak, Liputan, Banner, Bunga Papan, Papan Billboard	2 Kali	100.000.000	2 Kali, 5 Iklan, 1 Liputan, 12 Buah, 14 Buah, 1 Buah, 12 Bulan	102.200.000
IX.	PENGUATAN JARINGAN DAN PROGRAM KOORDINASI PERENCANAAN	Persentase Pelaksanaan Penguatan Jaringan dan Koordinasi Perencanaan	100%	2.186.000.000	100%	2.237.073.500
1.	Koordinasi perencanaan pengembangan ekonomi	Koordinasi dan fasilitasi perencanaan pengembangan	80 Kali	300.000.000	80 Kali	300.000.000

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENSTRA		DPA	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
	daerah Provinsi Lampung	ekonomi daerah dalam rangka sinergi pusat, daerah dan Kab/Kota				
2.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Kesra	Jumlah pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang Pemerintahan dan Kesra	80 Kali	200.000.000	13 kali Kab/Kota 7 kali Pusat	275.000.000
3.	Koordinasi Perencanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembangunan daerah	Terlaksananya koordinasi perencanaan pendanaan dan pembiayaan pembangunan Daerah serta Dokumen Kerangka Pembiayaan Kawasan Pasar Seni Enggal	15 Kali	200.000.000	1 Kali, 1 Dok	223.500.000
4.	Koordinasi Perencanaan Praswil, Tata Ruang dan LH	Tersedianya Dokumen Laporan Koordinasi, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengembangan wilayah	1 Dok	300.000.000	1 Dok	220.260.000
5.	Promosi Informasi Perencanaan Investasi Daerah	Keikutsertaan Prov.Lampung pada IIICE 2016 dan RGC 2016, Pembuatan bahan/materi promosi investasi daerah dan daya saing produk pertanian	2 Kali	225.000.000	2 Kali, 1 Event	575.000.000
6.	Koordinasi dan asistensi pemanfaatan dana pajak rokok	Terlaksananya koordinasi dan asistensi pemanfaatan dana pajak rokok	14 Kab/Kota	100.000.000	15 Kab/Kota	48.926.500
7.	Koordinasi Rencana Aksi Daerah tentang penurunan Gas Rumah Kaca dan antisipasi dampak perubahan iklim dan Monev lahan kritis	Tersedianya dokumen Laporan kegiatan pendukung penguatan kelembagaan pengelolaan irigasi Provinsi Lampung	1 Dok	125.000.000	1 Dok	75.000.000

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENSTRA		DPA	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
	(Koordinasi dan Monev LH)					
8.	Penunjang Program Pengelolaan Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi (WISMP-II) Provinsi Lampung	Tersedianya dokumen program/kegiatan pengelolaan sektor sumber daya air dan irigasi	1 Dok	66.000.000	1 Dok	50.000.000
9.	Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi Provinsi Lampung	Terlaksananya penguatan kelembagaan pengelolaan irigasi dalam rangka meningkatkan hasil produksi pertanian	2 Rapat	220.000.000	1 Rapat	140.000.000
10.	Fasilitasi kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL, Koordinasi Kawasan Kumuh/Tertinggal, Perumahan serta Pemukiman	Terlaksananya rapat Koordinasi dan konsultasi AMPL di Kab/Kota se-Provinsi Lampung	5 Rapat	75.000.000	5 Rapat	44.624.000
11.	Fasilitasi percepatan pelaksanaan program unggulan daerah bidang infrastruktur	Tersedianya laporan pelaksanaan program unggulan daerah bidang infrastruktur di Provinsi Lampung	1 Dok	100.000.000	1 Dok	34.763.000
12.	Koordinasi Monitoring pelaporan dan evaluasi Bidang Pengendalian	Terlaksananya koordinasi dan monitoring pelaporan dan evaluasi bidang pengendalian	15 Kab/Kota	100.000.000	15 Kab/Kota	100.000.000
13.	Fasilitasi Sekretariat Tim Penganggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Lampung	Tersusunnya dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Lampung	1 Dok	100.000.000	1 Dok	150.000.000

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENSTRA		DPA	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
XII.	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN FASILITASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat penyampaian laporan pelaksanaan APBN dari satker APBN	100%	1.875.000.000	100%	969.000.000
1.	Fasilitasi dan koordinasi Pemanfaatan anggaran DBHCHT untuk pengembangan sektor Perkebunan	Terlaksananya rapat koordinasi DBHCHT sektor perkebunan	-	-	3 Kali	36.000.000
2.	Fasilitasi Percepatan Pengembangan Kawasan Industri dan Pariwisata	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pengembangan kawasan industri dan pariwisata di Provinsi Lampung	10 Kali	200.000.000	10 Kali	200.000.000
3.	Fasilitasi dan koordinasi kedaulatan pangan dan peralihan kewenangan bidang energi dan kemaritiman	Sinergitas program dan kegiatan lingkup produksi	10 Kali	250.000.000	10 Kali	200.000.000
4.	Fasilitasi dan Koordinasi Program Pembangunan Mendukung Kedaulatan Pangan dan energi	Sinergitas program dan kegiatan lingkup produksi	10 Kali	250.000.000	10 Kali	125.000.000
5.	Fasilitasi Pengembangan Dunia Usaha dan Sinergitas Pembangunan Ekonomi Daerah	Terlaksananya gathering Sinergitas program dan pengembangan dunia usaha dan pengembangan ekonomi daerah	2 Kali	100.000.000	2 Kali	138.000.000
6.	Fasilitasi Analisis Kebijakan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan	Dokumen hasil analisis kebijakan pembangunan daerah bidang pemerintah dan	2 Dok	300.000.000	2 Dok	115.000.000

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENSTRA		DPA	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
	Kesejahteraan Masyarakat.	kesejahteraan masyarakat				
7.	Penyusunan Road Map Peningkatan IPM Provinsi Lampung	Terlaksananya rapat koordinasi dalam penyusunan Road Map IPM	-	-	3 Kali	155.000.000
XIII.	PROGRAM DAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN DAERAH	Jumlah dokumen/sistem informasi pengendalian dan evaluasi program pembangunan Provinsi	100%	1.435.000.000	100%	1.053.602.000
1.	Evaluasi hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan SKPD Prov.Lampung	Tersedianya dokumen tingkat pencapaian kinerja SKPD Provinsi Lampung terhadap RPJMD Provinsi Lampung	1 Dok	200.000.000	2 Dok	210.000.000
2.	Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda	Tersedianya dokumen capaian kinerja Bappeda selama 1 (satu) tahun	1 Dok	125.000.000	1 Dok	65.000.000
3.	Penyusunan Laporan Pasca-MDGs provinsi Lampung 2011-2015 akhir capaian	Tersusunnya Dokumen laporan pencapaian target pasca MDG's	1 Dok	100.000.000	1 Dok	115.000.000
4.	Peningkatan, pengendalian, monitoring dan pelaporan pelaksanaan pembangunan APBN (DK/TP/TA. 2015-2019)	Daftar program/kegiatan APBN tahun 2016, laporan konsolidasi pelaksanaan program APBN (Dk/TP) TA 2016, pemantauan pelaksanaan program APBN (DK/TP/UB) rapat koordinasi APBN (DK/TP/UB) 2016	30 Dok	250.000.000	30 Dok	150.000.000
5.	Fasilitasi dan Pembinaan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Kab/Kota	Jumlah fasilitasi, pelaksanaan penilaian APN dan evaluasi RPJMD 8 Kab/ Kota	-	-	15 Kab/ Kota	303.952.000

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENSTRA		DPA	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
6.	Peningkatan, pengendalian, monitoring dan pelaporan pelaksanaan pembangunan APBD TA 2016	Daftar lokasi program/kegiatan APBD, tahun 2016, daftar persandingan pagu dan lokasi kegiatan APBD dan APBN Ta. 2016 pemantauan pelaksanaan program APBD ta. 2016 rapat APBD ta 2016	2 Dok	185.000.000	3 Dok	49.650.000
7.	Koordinasi dan Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Tersusunnya dokumen pencegahan korupsi dan reformasi birokrasi	-	-	2 Dok	85.000.000
8.	Evaluasi hasil pencapaian renstra & renja bappeda	Tersusunnya dokumen tingkat pencapaian kinerja Bappeda tahun 2016	4 Dok	125.000.000	2 Dok	75.000.000
VIII.	PROGRAM PENGEMBANGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah dan analisis kebijakan bidang pembangunan ekonomi, bidang infrastruktur SDA dan pelestarian lingkungan hidup, bidang kesejahteraan rakyat serta bidang penegakan supremasi hukum.	100%	5.550.000.000	100%	818.283.365
1.	Fasilitasi penyelarasan RPJMN dan integrasi Undang-undang 23 tahun 2014 kedalam RPJMD Prov. Lampung 2015-2019	Tersedianya Dokumen revisi RPJMD Provinsi Lampung tahun 2015-2019	1 Dok	300.000.000	1 Dok	150.000.000
2.	Penyusunan Studi	Dokumen kajian rencana kerja	2 Dok	125.000.000	2 Dok	146.100.000

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	RENSTRA		DPA	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)	TARGET KINERJA	ANGGARAN (Rp)
	Pendahuluan Rencana Kerja Kemitraan Pembiayaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota	kemitraan pembiayaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota, Dokumen FS pinjaman daerah dan Kajian Kawasan Strategis Bakauheni				
3.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pasca MDGs (SDGs)	Terlaksananya rapat koordinasi perencanaan MDG's	2 Kali	100.000.000	2 Kali	62.183.365
4.	Penyusunan RAD Pangan dan Gizi 2015-2019	Tersusunnya Dokumen RAD pangan dan gizi 2015-2019	1 Dok	100.000.000	1 Dok	100.000.000
5.	Program Penyusunan Grand Design Kependudukan Provinsi Lampung	Tersusunnya Dokumen grand design kependudukan provinsi lampung	1 Dok	75.000.000	1 Dok	150.000.000
6.	Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek Infrastruktur Untuk Kerjasama Pemerintah dan Swasta	Tersusunnya dokumen studi lanjutan proyek infrastruktur untu kerjasama Pemerintah dan Swasta	1 Dok	100.000.000	3 Dok	210.000.000



BAB III

CAPAIAN KINERJA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2016

j.

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban keuangan dari anggaran kegiatan yang telah dilaksanakan dengan realisasi penggunaan anggaran. Untuk mencapai indikator keberhasilan selain faktor pendukung maka aspek keuangan sangat berpengaruh untuk mencapai indikator keberhasilan dimaksud. Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung pembiayaan yang memadai. Sumber pembiayaan kegiatan dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pada tahun 2016 belanja bidang perencanaan pembangunan daerah Provinsi Lampung terdiri atas belanja tidak langsung dan belanja langsung yang di laksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2016 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 serta Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 07 Tahun 2016 tanggal 17 November 2016 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016. Untuk melihat pembiayaan selama tahun 2016 dapat di uraikan sebagai berikut:



3.1 Realisasi Pencapaian Kinerja Program/ Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja Bappeda Provinsi Lampung 2016.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung telah melaksanakan sebanyak 14 program dengan 82 kegiatan pada tahun 2016. Realisasi Pencapaian Kinerja Program/ Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja Bappeda Provinsi Lampung 2016 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Matrik Realisasi Pencapaian Kinerja Program/ Kegiatan dan Anggaran Rencana Kerja Bappeda Provinsi Lampung 2016

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	%	
I.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran			
	1.	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tercapainya Kebutuhan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100%
	2.	Penyedia jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	100%
	3.	Penyedia jasa kebersihan kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%
	4.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya Bahan-bahan Bacaan Bappeda Provinsi	12 Bulan	12 Bulan	100%
	5.	Penyediaan jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis perkantoran	Terpenuhinya Pembayaran Tenaga Kontrak Kantor Bappeda Provinsi Lampung	9 Orang	9 Orang	100%
	6.	Pengembangan pengelolaan keuangan SKPD	Tersedianya dokumen capaian Laporan Keuangan	1 Dok	1 Dokumen	100%
	7.	Penata Usahaan Aset Daerah	Tersusunnya data Inventaris barang berupa Dokumen KIR, KIB, Daftar Inventaris Barang, Penghapusan Barang, dan Sensus Barang	5 Dok	5 Dok	100%
	8.	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan	100%
	9.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya cetakan dan penggandaan berupa Buku masuk/keluar, Buku BA Barang	31 Buku	31 Buku	100%
10.	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya alat-alat rumah tangga	12 Bulan	12 Bulan	100%	



NAMA PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KETERANGAN	
			TARGET	REALISASI	%		
	11.	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum harian, rapat dan tamu kantor Bappeda	12 Bulan	12 Bulan	100%	
	12.	Penyediaan jasa keamanan kantor dan rumah jabatan	Terpenuhinya jasa keamanan kantor	6 Orang	6 Orang	100%	
	13.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya jasa perbaikan alat kantor	100%	100%	100%	
	14.	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah (Output harus berupa hasil rapat tersebut)	45 Kali	45 Kali	100%	
II.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	
	1.	Peningkatan fasilitas gedung kantor	Tersedianya fasilitas kantor Bappeda Provinsi Lampung	100%	100%	100%	
	2.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terpenuhinya pengadaan sarana kantor	100%	100%	100%	
	3.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	100%	100%	100%	
	4.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tercapainya Perawatan Kendaraan Dinas secara rutin dan berkala	20 Buah	20 Buah	100%	
III.	PROGRAM PENINGKATAN DISPLIN APARATUR		Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100%	100%	100%	

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KETERANGAN	
			TARGET	REALISASI	%		
	1.	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas pegawai Bappeda Provinsi Lampung	130 Stel	130 Stel	100%	
IV.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	
	1.	Pendidikan dan pelatihan Aparatur	Terlaksananya Bimbingan Teknis pendidikan aparatur	50 Orang	50 Orang	100%	
	2.	Evaluasi Pengembangan Budaya Kerja	Terpenuhinya laporan evaluasi pengembangan budaya kerja, pembinaan kinerja aparatur serta sosialisasi kinerja aparatur	1 Dok, 4 kali rapat, 1 kali	1 Dok, 4 kali rapat, 1 kali	100%	
V.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Persentase Peningkatan Kapasitas SDM perencanaan	100%	100%	100%	
	1.	Pembinaan SDM Aparatur	Terlaksananya aktifitas olahraga dan ceramah agama bagi SDM Bappeda	48 Kali, 54 Kali	48 Kali, 54 Kali	100%	
VI.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN		Persentase Peningkatan Kapasitas kelembagaan perencanaan	100%	100%	100%	
	1.	Sosialisasi dan Publikasi Perencanaan Pembangunan	Terpenuhinya publikasi kegiatan Bappeda berupa Advertorial, Iklan Media Cetak, Liputan, Banner, Bunga Papan, Papan Billboard	2 Kali, 5 Iklan, 1 Liputan, 12 Buah, 14 Buah, 1 Buah	2 Kali, 5 Iklan, 1 Liputan, 12 Buah, 14 Buah, 1 Buah	100%	

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	%	
VII.	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUNAN	Persentase Pelaksanaan Perencanaan Daerah dan Bappeda Sesuai Dengan Perundang-undangan	100%	100%	91,67%	
	1. Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Provinsi	Pelaksanaan forum gabungan SKPD dan pelaksanaan Musrenbang Provinsi	2 Kali	2 Kali	100%	
	2. Penyusunan RKPD 2016	Dokumen RKPD Provinsi Lampung	2 Dok	2 Dok	100%	
	3. Rapat koordinasi dan konsultasi perencanaan	Mengakomodasi sinkronnya Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Koordinasi bidang perencanaan	5 Kali, 7 Kali	5 Kali, 7 Kali	100%	
	4. Penyusunan Dokumen Perencanaan Bappeda Provinsi Lampung	Tersusunnya Dokumen Renja, PPAS, RKA, dan DPA Bappeda	4 Dok	4 Dok	100%	
	5. Informasi Perencanaan Pembangunan Terpadu (IPPT)	Terlaksananya informasi perencanaan pembangunan terpadu (pameran pembangunan)	1 kali	0 Kali	0%	Pembatalan Lampung Fair sesuai Surat Edaran No. 045.2/2055/SE.III/04/2016 tanggal 7 Oktober 2016
	6. Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang kab/kota	Terlaksananya Musrenbang Kab/Kota se-Prov. Lampung	15 Kab/ Kota	15 Kab/ Kota	100%	
	7. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Perencanaan Online	Terpeliharanya dan updating sistem perencanaan pembangunan daerah (SIPPD) Provinsi Lampung	1 tahun	1 Tahun	100%	
	8. Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran (KUA/PPAS dan PRA RKA APBD P 2016-2017)	Dokumen KUA/PPAS APBD/P 2016-2017	4 dok	2 Dok KUA 2016, 2 Dok PPAS 2016	100%	

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KETERANGAN	
			TARGET	REALISASI	%		
	9.	Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya workshop perencanaan pembangunan Daerah	1 Kali	1 Kali	100%	
	10.	Pembinaan Penyusunan RKPD Kab/Kota	Terlaksananya pembinaan RKPD Kab/Kota	15 Kab/ Kota	15 Kab/ Kota	100%	
	11.	Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen pemetaan masalah, potensi, agenda strategis pembangunan daerah serta pengendalian dan evaluasi program-program unggulan	2 Dok	2 Dok	100%	
	12.	Fasilitasi kegiatan Musrenbang Nasional	Partisipasi Prov.Lampung dalam rangkaian kegiatan Musrenbang Nasional tahun 2016	1 Kali	1 Kali	100%	
VIII.	PROGRAM PENGEMBANGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah dan analisis kebijakan bidang pembangunan ekonomi, bidang infrastruktur SDA dan pelestarian lingkungan hidup, bidang kesejahteraan rakyat serta bidang penegakan supremasi hukum.	100%	100%	100%	
	13.	Fasilitasi penyelarasan RPJMN dan integrasi Undang-undang 23 tahun 2014 kedalam RPJMD Prov. Lampung 2015-2019	Tersedianya Dokumen revisi RPJMD Provinsi Lampung tahun 2015-2019	1 Dok	1 Dok	100%	
	14.	Penyusunan Studi Pendahuluan Rencana Kerja Kemitraan Pembiayaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Dokumen kajian rencana kerja kemitraan pembiayaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota, Dokumen FS pinjaman daerah dan Kajian Kawasan Strategis Bakauheni	2 Dok	2 Dok	100%	

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	%	
15.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Pasca MDGs (SDGs)	Terlaksananya rapat koordinasi perencanaan MDG's	2 Kali	2 Kali	100%	
16.	Penyusunan RAD Pangan dan Gizi 2015-2019	Tersusunnya Dokumen RAD pangan dan gizi 2015-2019	1 Dok	1 Dok	100%	
17.	Program Penyusunan Grand Design Kependudukan Provinsi Lampung	Tersusunnya Dokumen grand design kependudukan provinsi lampung	1 Dok	1 Dok	100%	
18.	Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek Infrastruktur Untuk Kerjasama Pemerintah dan Swasta	Tersusunnya dokumen studi lanjutan proyek infrastruktur untu kerjasama Pemerintah dan Swasta	3 Dok	3 Dok	100%	
IX.	PROGRAM PENGUATAN JARINGAN DAN PROGRAM KOORDINASI PERENCANAAN	Persentase Pelaksanaan Penguatan Jaringan dan Koordinasi Perencanaan	100%	100%	99,12%	
1.	Koordinasi perencanaan pengembangan ekonomi daerah Provinsi Lampung	Koordinasi dan fasilitasi perencanaan pengembangan ekonomi daerah dalam rangka sinergi pusat, daerah dan Kab/Kota	80 Kali	80 Kali	100%	
2.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Kesra	Jumlah pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang Pemerintahan dan Kesra	13 kali Kab/Kota 7 kali Pusat	13 kali Kab/Kota 7 kali Pusat	100%	
3.	Koordinasi Perencanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembangunan daerah	Terlaksananya koordinasi perencanaan pendanaan dan pembiayaan pembangunan Daerah serta Dokumen Kerangka Pembiayaan Kawasan Pasar Seni Enggal	1 Kali, 1 Dok	1 Kali, 1 Dok	100%	



NAMA PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	%	
4.	Koordinasi Perencanaan Praswil, Tata Ruang dan LH	Tersedianya Dokumen Laporan Koordinasi, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengembangan wilayah	1 Dok	1 Dokumen	100%	
5.	Promosi Informasi Perencanaan Investasi Daerah	Keikutsertaan Prov.Lampung pada IIICE 2016 dan RGC 2016, Pembuatan bahan/materi promosi investasi daerah dan daya saing produk pertanian	2 Kali, 1 Event	2 Kali, 1 Event	100%	
6.	Koordinasi dan asistensi pemanfaatan dana pajak rokok	Terlaksananya koordinasi dan asistensi pemanfaatan dana pajak rokok	15 Kab/ Kota	15 Kab/ Kota	100%	
7.	Koordinasi Rencana Aksi Daerah tentang penurunan Gas Rumah Kaca dan antisipasi dampak perubahan Iklim dan Monev lahan kritis (Koordinasi dan Monev LH)	Tersedianya dokumen Laporan kegiatan pendukung penguatan kelembagaan pengelolaan irigasi Provinsi Lampung	1 Dok	1 Dok	100%	
8.	Penunjang Program Pengelolaan Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi (WISMP-II) Provinsi Lampung	Tersedianya dokumen program/kegiatan pengelolaan sektor sumber daya air dan irigasi	1 Dok	1 Dok	100%	
9.	Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi Provinsi Lampung	Terlaksananya penguatan kelembagaan pengelolaan irigasi dalam rangka meningkatkan hasil produksi pertanian	1 Rapat	1 Rapat	100%	
10.	Fasilitasi kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL, Koordinasi Kawasan Kumuh/Tertinggal, Perumahan serta Pemukiman	Terlaksananya rapat Koordinasi dan konsultasi AMPL di Kab/Kota se-Provinsi Lampung	5 Rapat	4 Rapat	88,62%	Efisiensi anggaran dan Revisi Annual Work Plan (AWP)

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KETERANGAN	
			TARGET	REALISASI	%		
	11.	Fasilitasi percepatan pelaksanaan program unggulan daerah bidang infrastruktur	Tersedianya laporan pelaksanaan program unggulan daerah bidang infrastruktur di Provinsi Lampung	1 Dok	1 Dok	100%	
	12.	Koordinasi Monitoring pelaporan dan evaluasi Bidang Pengendalian	Terlaksananya koordinasi dan monitoring pelaporan dan evaluasi bidang pengendalian	15 Kab/ Kota	15 Kab/ Kota	100%	
	13.	Fasilitasi Sekretariat Tim Penganggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Lampung	Tersusunnya dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Lampung	1 Dok	1 Dok	100%	
X.	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH		Persentase Pemenuhan Koordinasi pembangunan Regional Sumatera.	100%	100%	100%	
	1.	Rapat Koordinasi Gubernur se Wilayah Sumatera	Pelaksanaan rapat koordinasi Gubernur se-Wilayah Sumatera	1 Kali	1 Kali	100%	
XI.	PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG		Persentase Pemenuhan koordinasi dan dokumen Tata Ruang	100%	100%	100%	
	2.	Penyusunan dan Legalisasi RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah (RTRKS/RDTR/KSCT) Provinsi Lampung	Terevaluasinya revisi Dokumen RTRW Tahun 2009-2029 dan terlaksananya konsultasi publik	2 Dok	2 Dok	100%	
	3.	Fasilitasi dan koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD	Koordinasi dan konsolidasi BKPRD Prov. Lampung	1 Dok	1 Dok	100%	

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KETERANGAN
		TARGET	REALISASI	%	
XII. PROGRAM PENGEMBANGAN DAN FASILITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat fasilitasi kebijakan daerah	100%	100%	91,39%	
4. Fasilitasi dan koordinasi Pemanfaatan anggaran DBHCHT untuk pengembangan sektor Perkebunan	Terlaksananya rapat koordinasi DBHCHT sektor perkebunan	3 Kali	3 Kali	100%	
5. Fasilitasi Percepatan Pengembangan Kawasan Industri dan Pariwisata	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pengembangan kawasan industri dan pariwisata di Provinsi Lampung	10 Kali	10 Kali	100%	
6. Fasilitasi dan koordinasi kedaulatan pangan dan peralihan kewenangan bidang energi dan kemaritiman	Sinergitas program dan kegiatan lingkup produksi	10 Kali	10 Kali	100%	
7. Fasilitasi dan Koordinasi Program Pembangunan Mendukung Kedaulatan Pangan dan energi	Sinergitas program dan kegiatan lingkup produksi	10 Kali	10 Kali	100%	
8. Fasilitasi Pengembangan Dunia Usaha dan Sinergitas Pembangunan Ekonomi Daerah	Sinergitas program dan pengembangan dunia usaha dan pengembangan ekonomi daerah	2 Kali	2 Kali	100%	
9. Fasilitasi Analisis Kebijakan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat.	Tersusunnya dokumen hasil analisis kebijakan pembangunan daerah bidang pemerintah dan kesejahteraan masyarakat	2 Dok	2 Dok	100%	

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KETERANGAN	
			TARGET	REALISASI	%		
	10.	Penyusunan Road Map Peningkatan IPM Provinsi Lampung	Penyusunan Dokumen road map peningkatan IPM Provinsi Lampung, tapi ada efisiensi sehingga hanya terealisasi dalam bentuk rapat koordinasi penyusunan dokumen	1 dok	3 kali rapat persiapan	39,76%	Efisiensi Anggaran, penyusunan Road Map Peningkatan IPM ditunda
XIII.	PROGRAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH		Jumlah dokumen/sistem informasi pengendalian dan evaluasi program pembangunan Provinsi	100%	100%	100%	
	1.	Evaluasi hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan SKPD Prov.Lampung	Tersedianya dokumen tingkat pencapaian kinerja SKPD Provinsi Lampung terhadap RPJMD Provinsi Lampung	2 Dok	2 Dok	100%	
	2.	Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda	Tersedianya dokumen capaian kinerja Bappeda selama 1 (satu) tahun	1 Dok	1 Dok	100%	
	3.	Penyusunan Laporan Pasca-MDGs provinsi Lampung 2011-2015 akhir capaian	Tersusunnya Dokumen laporan pencapaian target pasca MDG's	1 Dok	1 Dok	100%	
	4.	Peningkatan, pengendalian, monitoring dan pelaporan pelaksanaan pembangunan APBN (DK/TP/TA. 2015-2019	Daftar program/kegiatan APBN tahun 2016, laporan konsolidasi pelaksanaan program APBN (Dk/TP) TA 2016, pemantauan pelaksanaan program APBN (DK/TP/UB) rapat koordinasi APBN (DK/TP/UB) 2016	30 Dok	30 Dok	100%	
	5.	Fasilitasi dan Pembinaan evaluasi hasil pelaksanaan RKPd Kab/Kota	Jumlah fasilitasi, pelaksanaan penilaian APN dan evaluasi RPJMD 8 Kab/ Kota	15 Kab/ Kota, 8 Dok	15 Kab/ Kota, 8 Dok	100%	

NAMA PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KETERANGAN	
			TARGET	REALISASI	%		
	6.	Peningkatan, pengendalian, monitoring dan pelaporan pelaksanaan pembangunan APBD TA 2016	Daftar lokasi program/kegiatan APBD, tahun 2016, daftar persandingan pagu dan lokasi kegiatan APBD dan APBN Ta. 2016 pemantauan pelaksanaan program APBD TA. 2016 rapat APBD TA 2016	3 Dok	3 Dok	100%	
	7.	Koordinasi dan Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Tersusunnya dokumen pencegahan korupsi dan reformasi birokrasi	2 Dok	2 Dok	100%	
	8.	Evaluasi hasil pencapaian renstra & renja bappeda	Tersusunnya dokumen tingkat pencapaian kinerja Bappeda tahun 2016	2 Dok	2 Dok	100%	
XIV.	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI		Terbangunnya sistem data/informasi pembangunan daerah	100%	100%	90,75%	
	1.	Pembangunan Database Metadata Spasial	Terlaksananya koordinasi ke Pemerintah pusat dan Kab/ Kota, terpenuhinya jumlah peserta pelatihan Drone	17 Kali, 10 Orang	9 Kali, 10 Orang	77,27%	Efisiensi Anggaran
	2.	Pengelolaan Informasi Elektronik dan Perpustakaan Bappeda Provinsi Lampung	Updating website dan data penunjang, terlaksananya koordinasi ke Pusat	1 Kali, 3 Kali	1 Kali, 3 Kali	100%, 100%	
	3.	Penyusunan bahan Publikasi Profil Pembangunan Provinsi Lampung	Tersediannya bahan publikasi profil pembangunan Provinsi Lampung	3 Panel display data, 100 buku saku profil Lampung	3 Panel display data, 100 buku saku profil Lampung	100%	



NAMA PROGRAM/ KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	KINERJA			KETERANGAN
			TARGET	REALISASI	%	
4.	Pengelolaan Simpul Jaringan Data Spasial Nasional	Kelancaran akses arus data pada jaringan informasi geospasial Nasional	1 Tahun, 1 Paket, 17 Rapat	1 Tahun, 1 Paket, 9 Rapat	86,79%	Efisiensi Anggaran
5.	Padu serasi informasi geospasial Provinsi Lampung	Terlaksananya Rapat Koordinasi terkait informasi Geospasial	17 Rapat	11 Rapat	65%	Efisiensi Anggaran
6.	Penyusunan Data Indikator Kinerja Pemerintah Daerah	Tersedianya buku indikator kinerja Pemerintah, buku lampung dalam angka tahun 2015	75 buku DIKP, 25 buku LDA	75 buku DIKP, 25 buku LDA	100%	
7.	Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional (Siskurtanas)	Updating data Siskurtanas Provinsi Lampung	1 dok (8 gatra)	1 dok (8 gatra)	100%	
8.	Koordinasi Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Terisinya data sistem informasi pembangunan daerah secara online (SIPD-online)	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%	
9.	Penyusunan Data Indikator Utama Ekonomi Makro dan Keuangan Daerah Provinsi Lampung	Buku Statistik ekonomi makro Provinsi Lampung	120 Buku	120 Buku	100%	
10.	Koordinasi Pengelolaan data dan informasi geospasial Provinsi Lampung	Terlaksananya Rapat ke Pemerintah Pusat dan Kab/ Kota, terpenuhinya pelatihan pengelolaan data	19 Rapat, 25 Orang	15 Rapat, 25 Orang	87,73%	Efisiensi Anggaran



3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Renstra

Sasaran capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Renstra Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 dengan tingkat capaian dan realisasi capaian tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Matrik Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI TINGKAT CAPAIAN	%
1.	Meningkatnya kualitas dan proses penyusunan dokumen perencanaan tahunan sesuai jadwal dan peraturan yang berlaku.	Persentase konsistensi Program RPJMD dengan Program RKPd.	100%	100%	100
		Persentase konsistensi Program RKPd dengan Program KUA PPAS.	95%	100%	105
2.	Meningkatnya sinergi perencanaan antara SKPD provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah pusat serta seluruh stakeholders pembangunan.	Kesesuaian antara prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung dan prioritas Pemerintah pusat;	95%	100%	105
3.	Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian/analisis kebijakan perencanaan dalam implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 2015-2019.	Jumlah Analisis kebijakan perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan	95%	100%	105
4.	Meningkatnya kualitas Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan rencana pembangunan	Persentase SKPD melaporkan hasil evaluasi Renja SKPD sesuai dengan ketentuan	80%	96%	120



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI TINGKAT CAPAIAN	%
	daerah.				
5.	Optimalisasi keterisian data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan terintegrasi.	Persentase keterisian data dan informasi perencanaan pembangunan (SIPD).	50%	24%	48
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN					97,16

Pada tabel diatas sasaran strategis dalam Renstra pada tahun 2016 dapat tercapai dengan baik. Pencapaian tersebut dapat terlihat dari persentase yang mencapai nilai 97,16%. Capaian sasaran merupakan hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2016 dengan menggunakan sumber dana APBD maupun APBN.

Berdasarkan sasaran strategis, capaian kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dan proses penyusunan dokumen perencanaan tahunan sesuai jadwal dan peraturan yang berlaku.

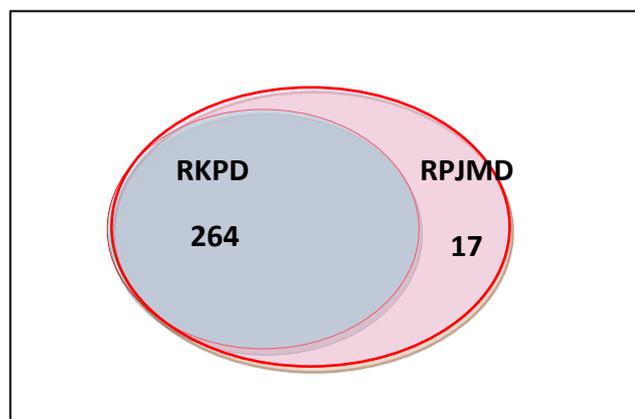
Perencanaan pembangunan yang baik adalah perencanaan yang mengakomodir aspirasi para pemangku kepentingan dan disusun melalui prosedur dan mekanisme sesuai aturan yang telah ditetapkan. Hal tersebut yang menjadi sasaran organisasi Bappeda untuk menghasilkan output perencanaan pembangunan daerah Lampung yang didalamnya mengakomodir kepentingan seluruh pembangunan baik kabupaten/kota maupun Provinsi. Proses penyusunan perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung telah dilakukan meliputi : Forum Gabungan SKPD Provinsi, Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten dan Kota, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta guna menyampaikan aspirasi daerah serta sinkronisasi program pusat dan daerah. Indikator kinerja sasaran 2 ini terdapat 2 indikator sasaran. **Indikator sasaran 1.a** adalah Persentase

konsistensi Program RKPD dengan Program RPJMD dengan target kinerja sebesar 100%.

Berdasarkan hasil analisis perbandingan (analisis komparatif) terhadap RKPD Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan RPJMD Provinsi Lampung tahun pelaksanaan 2016 dapat diketahui tingkat konsistensi sebesar 100%, perbandingannya sebagai berikut :

1. Program prioritas yang tercantum dalam RKPD tahun 2016 sejumlah 264 program, sedangkan yang tercantum dalam RPJMD adalah 281 program.
2. Dari jumlah program tersebut, terdapat 264 program yang sesuai (nama program terdapat dalam RKPD maupun RPJMD) sedangkan 17 program RPJMD tidak dilaksanakan pada tahun 2016. Tingkat kesesuaian tersebut diilustrasikan dalam gambar sebagai berikut :

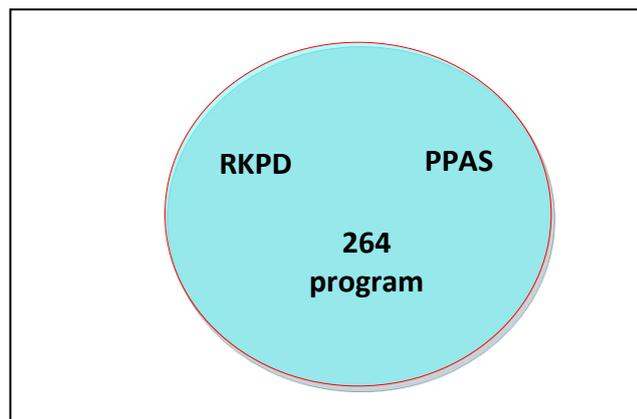
Gambar 3.1 Irisan Kesesuaian Program RKPD Dengan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2016



Indikator sasaran 1.b adalah Persentase konsistensi Program KUA PPAS dengan Program RKPD dengan target kinerja sebesar 95%.

Berdasarkan hasil analisis perbandingan (analisis komparatif) terhadap RKPD Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan PPAS Provinsi Lampung, diperoleh perbandingan sebagai berikut : program yang tercantum dalam RKPD tahun 2016 sejumlah 264 program sedangkan yang tercantum dalam PPAS adalah 264 program, sehingga, realisasi capaian kinerja sasaran strategis 2.b sebesar 100%. Dengan demikian disimpulkan bahwa seluruh program yang terdapat di dalam PPAS 2016 terdapat di dalam dokumen RKPD. Hal ini karena dalam penyusunan rencana tahun 2016 sudah menggunakan sistem informasi sehingga tidak dimungkinkan SKPD memilih kegiatan diluar menu kegiatan yang sudah diinput di sistem informasi. Tingkat kesesuaian tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut :

Gambar 3.2 Irisan Kesesuaian RKPD dengan PPAS Provinsi Lampung Tahun 2016



Realisasi capaian kinerja sasaran strategis 2 dilaksanakan melalui pelaksanaan 2 program yaitu : Program Perencanaan Pembangunan Daerah Tahunan dan Pengembangan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

- Sasaran 2** : Meningkatnya sinergi perencanaan antara SKPD provinsi, kabupaten/kota dan pemerintah pusat serta seluruh stakeholders pembangunan. **Indikator pada sasaran 2** ini adalah Kesesuaian antara prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung dan prioritas Pemerintah pusat sebesar 95%. Realisasi kinerja pada sasaran 2 pada tahun



2016 sebesar 100% yang dilaksanakan melalui pelaksanaan 1 Program, yaitu : Program Penguatan Jaringan dan Program Koordinasi Perencanaan.

Berdasarkan analisis keterkaitan dan keselarasan antara Rencana pembangunan pusat dan daerah dapat diketahui sebagai berikut :

- Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2016 adalah ***Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Pondasi Pembangunan yang Berkualitas***, hal tersebut selaras dengan Tema RKPD Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan tema ***Percepatan pembangunan Infrastruktur dan Pelayanan Publik untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas***.
- Penyelarasan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD 2016 juga diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional, sebagaimana matrik dibawah ini :

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH
DIMENSI PEMBANGUNAN MANUSIA • Pendidikan • Kesehatan • Perumahan • Mental/Karakter	<ul style="list-style-type: none">• P3. MENINGKATKAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MEMPERLUAS KESEMPATAN KERJA DAN MENGURANGI KEMISKINAN• P4: MENINGKATKAN KUALITAS DAN AKSESIBILITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR UNGGULAN • Kedaulatan Pangan • Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan • Kemaritiman dan Kelautan • Pariwisata dan industri	<ul style="list-style-type: none">• P2. REVITALISASI PERTANIAN DAN KELAUTAN UNTUK Mendukung KETAHANAN PANGAN DAERAH DAN NASIONAL• P7. MENGEMBANGKAN INDUSTRI, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF SERTA MENINGKATAN DAYA SAING KOPERASI & UMKM
DIMENSI PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN • Antar Kelompok Pendapatan • Antar Wilayah : 1) desa, 2) pinggiran, 3) luar jawa dan 4) Kawasan timur	<ul style="list-style-type: none">• P1. MEMANTAPKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR UNTUK Mendukung PENGEMBANGAN WILAYAH• P8. MEMANTAPKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM YANG BERKELANJUTAN DAN MENINGKATKAN KESIAGAAN PENANGGULANGAN



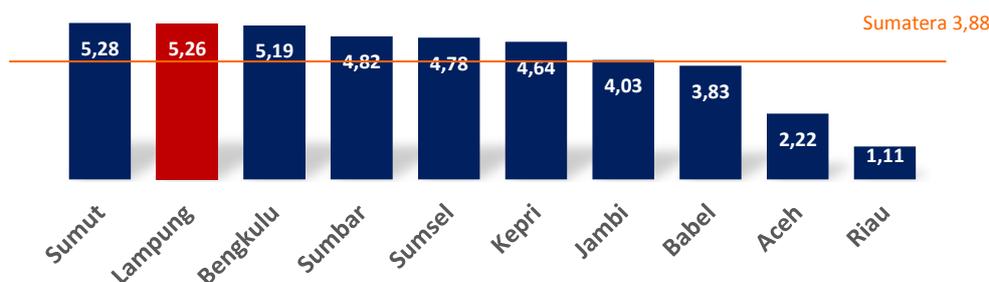
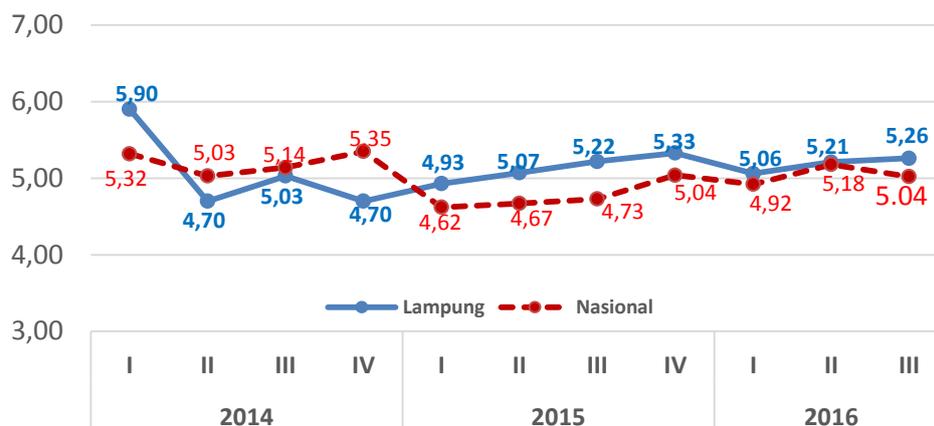
	BENCANA
KONDISI PERLU <ul style="list-style-type: none">• Kepastian dan Penegakan Hukum• Keamanan dan ketertiban• Politik dan demokrasi• Tata kelola dan RB	<ul style="list-style-type: none">• P5. MEMANTAPKAN REFORMASI BIROKRASI DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN APARATUR• P6. MENDUKUNG STABILITAS KAMTIBMAS DAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PERIJINAN UNTUK MENCIPTAKAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF

- Capaian kinerja indikator makro pembangunan Provinsi Lampung sampai dengan Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi

Di tengah pemulihan ekonomi global yang masih berlangsung lambat, perekonomian Lampung sepanjang tahun 2016 masih dapat tumbuh cukup tinggi. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung tahun 2016 selalu berada di atas Nasional dan rata-rata Sumatera. Pada Triwulan III-2016 pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung menempati posisi kedua tertinggi di wilayah Sumatera setelah Provinsi Sumatera Utara. Perekonomian Lampung tahun 2016 masih didominasi 3 Sektor Utama yang pencapaiannya pada Triwulan III-2016 yaitu: (1) Pertanian, Kehutanan, Perikanan 33,30% ; (2) Industri Pengolahan 18,20% ; serta (3) Perdagangan dan Reparasi Kendaraan 11,15%.

Gambar 3.3 **Pertumbuhan ekonomi Prov. Lampung 2014 - 2016**

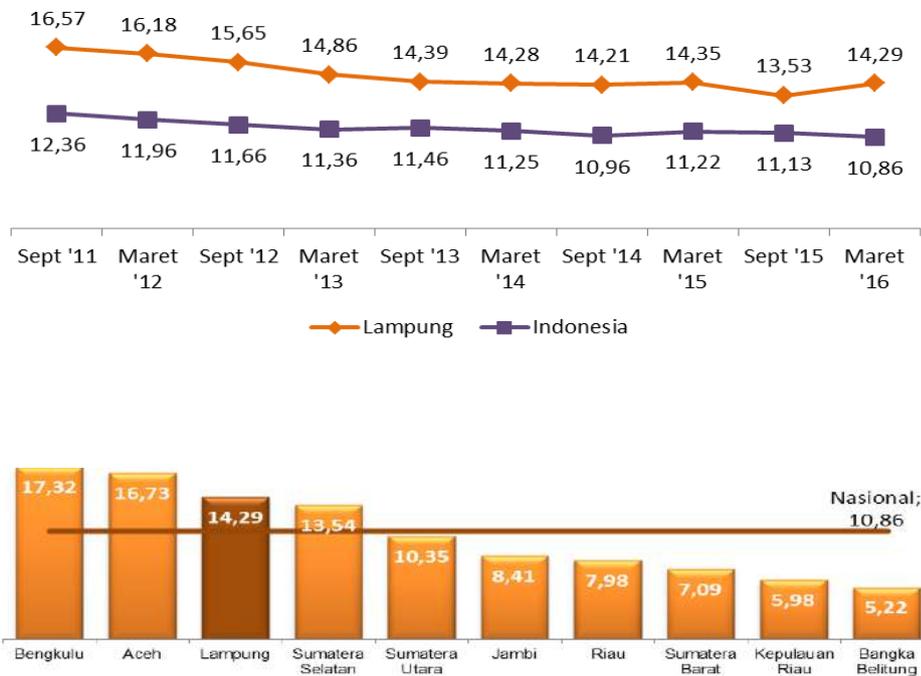


2. Tingkat Kemiskinan

Secara gradual angka kemiskinan mengalami penurunan terus-menerus (16,93% di Maret 2011 menjadi 13,53% di September 2015), namun pada Maret 2016 mengalami kenaikan menjadi 14,29%. Jika dibandingkan dengan data Maret 2015 sebesar 14,35% tingkat kemiskinan pada Maret 2016 turun sebesar 0,06%. Kenaikan angka kemiskinan ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Lampung pada Triwulan I 2016 terhadap Triwulan IV 2015 yang mengalami kontraksi hingga tumbuh minus 0,27 persen. Berdasarkan daerah tempat tinggal, penduduk miskin terkonsentrasi di perdesaan dengan tingkat kemiskinan sebesar 15,69%.

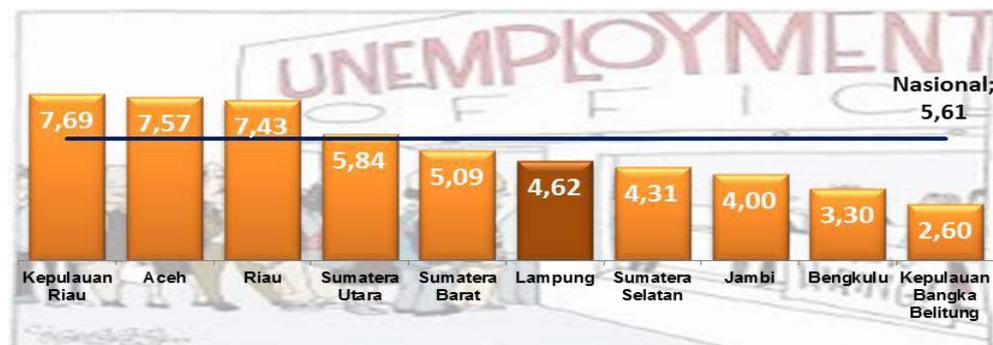
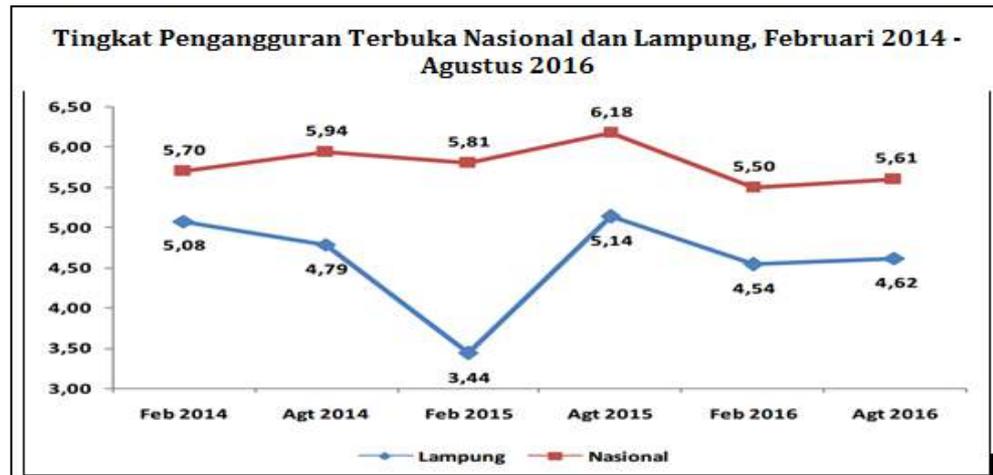
Gambar 3.4 **Persentase Penduduk Miskin Provinsi Lampung dan Indonesia, 2011 - 2016**

Persentase Penduduk Miskin Provinsi Lampung dan Indonesia, 2011-2016



3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran di Provinsi Lampung pada Agustus 2016 sebesar 4,62% naik 0,08% dibanding Februari 2016 yang angkanya 4,54%, namun bila dibandingkan dengan Agustus 2015 sebesar 5,14% (*year on year*) telah terjadi penurunan angka pengangguran sebesar 0,52%. Angka pengangguran Lampung pada bulan Agustus 2016 ini masih di bawah angka pengangguran nasional yang sebesar 5,61%. Maka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Lampung masih lebih rendah dibanding rata-rata Nasional.



3. **Sasaran 3** : Meningkatnya pemanfaatan hasil kajian/analisis kebijakan perencanaan dalam implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 2015-2019. Indikator kinerja sasaran 3 adalah Jumlah Analisis kebijakan perencanaan pembangunan yang dimanfaatkan dengan target kinerja sebesar 95%. Analisis kebijakan guna mendukung peningkatan pembangunan ekonomi dan memperkuat kemandirian daerah, mendukung peningkatan infrastruktur, SDA dan LH, mendukung peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, iptek dan inovasi, budaya masyarakat dan kehidupan beragama yang toleran, dan mendukung penegakan supremasi hukum, pengembangan demokrasi berbasis kearifan lokal dan pemantapan pemerintahan yang baik dan antisipatif. Tahun 2016, terkait hasil analisis kebijakan yang telah dilaksanakan, antara lain :

1. Draft Akhir Revisi Dokumen RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah (RDTR/KSCT);



2. Konsolidasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD);
3. Koordinasi DBHCHT di sektor perkebunan;
4. Koordinasi pengembangan kawasan industri dan pariwisata;
5. Koordinasi program pembangunan mendukung kedaulatan pangan dan energi;
6. Dokumen analisis kebijakan pembangunan daerah bidang pemerintah dan kesejahteraan masyarakat;

Dokumen-dokumen tersebut dimanfaatkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Lampung sehingga Capaian kinerja pada sasaran 3 dari 3 dokumen analisis kebijakan yang dihasilkan secara keseluruhan (100%) termanfaatkan. Capaian indikator kinerja pada sasaran 3 dicapai melalui pelaksanaan 3 Program yaitu : Program Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah, Program Perencanaan Tata Ruang, Program Pengembangan dan Fasilitas Kebijakan Pembangunan Daerah.

4. **Sasaran 4** : Meningkatnya kualitas Pengendalian dan Evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Indikator kinerja sasaran 4 adalah Persentase SKPD melaporkan hasil evaluasi Renja SKPD sesuai dengan ketentuan dengan target kinerja sebesar 80%. Realisasi capaian nya sebesar 96% dikarenakan ada 2 dari 55 SKPD yang belum melaporkan evaluasi Renja nya.

Sasaran strategis 4 dilakukan melalui evaluasi dalam rangka memastikan dan menjamin realisasi pelaksanaan pencapaian target indikator sasaran Rencana pembangunan jangka menengah yang sudah tertuang dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD). Evaluasi yang telah dilakukan pada tahun 2016, antara lain :

1. Dokumen capaian kinerja SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Lampung;
2. Dokumen Laporan Kinerja Bappeda tahun 2016;



3. Dokumen capaian target pasca MDG's;
4. Dokumen daftar Program/ Kegiatan;
5. Dokumen laporan konsolidasi;
6. Dokumen Proceeding;
7. Evaluasi dokumen RPJMD 8 Kabupaten/ Kota;
8. Dokumen persandingan APBD dan APBN;
9. Dokumen pencegahan korupsi dan reformasi birokrasi;
10. Dokumen pencapaian kinerja Bappeda tahun 2016.

Berdasarkan upaya-upaya monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan untuk mengawal ketercapaian target indikator pembangunan jangka menengah pada tahun 2016 tingkat ketercapaian target indikator sebesar 80%. Capaian kinerja pada sasaran 5 sebesar 96% yang dicapai melalui pelaksanaan 1 Program yaitu : Program Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

5. **Sasaran 5** : Optimalisasi Penyediaan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang Akurat dan Terintegrasi. Indikator kinerja sasaran 6 adalah Persentase keterisian data dan informasi perencanaan pembangunan (SIPD) dengan target sebesar 50%.

Indikator kinerja sasaran 5 adalah dalam rangka Meningkatkan kualitas, ketersediaan dan kemudahan aksesibilitas data dan informasi perencanaan pembangunan bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan database untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil perhitungan ketersediaan data di SIPD dapat diketahui bahwa jumlah data yang seharusnya terisi sebanyak 2.691 data atau 1 aplikasi dengan realisasi capaian kinerja 100%. Beberapa kendala yang dihadapi dalam Kabupaten/ Kota dalam pelaksanaan SIPD antara lain:

- a. Sulitnya akses internet pada beberapa Kabupaten terutama untuk Daerah Otonomi Baru (DOB) dan mutasi pejabat/ staf pengelola data yang telah mengikuti pelatihan;



- b. Beberapa daerah belum berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik di daerah masing-masing;
- c. Dana yang teralokasi untuk pengelolaan data sangat minim dan beberapa Kabupaten/Kota belum menganggarkan SIPD dalam APBD Kabupaten/Kota serta kurangnya dukungan dari pimpinan (*political will*).

Optimalisasi pengisian data SIPD penting untuk terus ditingkatkan melalui koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, antara lain : SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Lampung, Kabupaten/kota dan Stakeholder.

Tahun 2016, dukungan terkait ketersediaan data antara lain melalui :

1. Database Metadata Spasial;
2. Pengembangan Website Bappeda;
3. Media publikasi profil pembangunan Provinsi Lampung;
4. Penyediaan simpul jaringan berupa arus akses informasi geospasial, peta administrasi dan peta tematik;
5. Penyediaan informasi Geospasial Provinsi Lampung;
6. Buku indikator kinerja Pemerintah;
7. Buku Lampung Dalam Angka (LDA);
8. Updating data Siskurtanas 8 Gatra;
9. Data sistem informasi pembangunan daerah secara Online (SIPD Online);
10. Buku statistik ekonomi makro;

Capaian kinerja pada sasaran 6 sebesar 48% melalui pelaksanaan 1 Program yaitu : Program Pengembangan Data dan Informasi.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) sasaran utama Bappeda Provinsi Lampung sebagaimana tersebut diatas, terdapat sasaran pendukung yaitu Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan. Indikator dan capaian sasaran pendukung adalah sebagai berikut :



NO	SASARAN PENDUKUNG	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	REALISASI TINGKAT CAPAIAN	%
1	Meningkatnya kualitas dan kapasitas kelembagaan	a. Persentase disiplin kehadiran dan kinerja ASN Bappeda per tahun	92,5%	93,54%	101
		b. Persentase pemenuhan sarana prasarana perkantoran	70%	70%	100

Capaian kualitas dan kapasitas kelembagaan sangat terkait dengan kondisi Aparatur Sipil Negara (ASN) beserta sarana prasarana yang ada. Saat ini, Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi sangat penting terkait untuk mendukung peningkatan kinerja pelayanan Bappeda di bidang perencanaan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk peningkatan kedisiplinan dan kinerja ASN di lingkungan Bappeda Provinsi Lampung adalah penerapan absensi elektronik dan penilaian kinerja yang dilakukan oleh atasan langsung. Tingkat kehadiran dan hasil penilaian kinerja digunakan untuk pemberian insentif. Selain kedisiplinan dan kinerja, hal lain yang diperlukan adalah Ketersediaan peralatan kerja berupa personal komputer, laptop, printer, kamera, dan lainnya. Peralatan kerja sudah cukup tersedia namun dengan tingginya intensitas tugas-tugas yang harus diselesaikan membutuhkan ketersediaan peralatan yang cukup dan siap pakai. Oleh karena itu, **Indikator kinerja sasaran 1.a** adalah Persentase disiplin kehadiran dan kinerja ASN Bappeda per tahun dengan target kinerja sebesar 92,5%. Hasil perhitungan/rekap absensi sepanjang tahun 2016 dan rekap hasil absensi dapat diketahui sebesar 93,54%, sehingga capaian kinerja sebesar 101%. **Indikator sasaran 1.b** adalah Persentase Pemenuhan sarana prasarana perkantoran dengan target capaian kinerja 70%. Pengadaan yang dilakukan untuk pemenuhan sarana dan prasaran kantor antara lain : Pengadaan ATK, Barang Cetakan, Penggandaan, Instransi Listrik/Penerangan Kantor dan Alat-Alat rumah Tangga. Realisasi capaian kinerja indikator sebesar 100%. Pencapaian Indikator 1.a dan 1.b dicapai melalui 5 (lima) Program, yaitu :



- a) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- b) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c) Program pelayanan administrasi perkantoran;
- d) Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- e) Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

Terkait dengan Indikator sasaran kinerja untuk Persentase disiplin kehadiran dan kinerja ASN Bappeda, mulai tahun 2016 sudah dilakukan secara efektif absensi elektronik dan monitoring pencapaian kinerja per bulan. Hasil rekap absensi dan kinerja perbulan berpengaruh langsung terhadap besaran tunjangan kinerja yang dibayar ke ASN Bappeda. Oleh karena itu besaran tunjangan kinerja nilainya berbeda untuk masing-masing ASN tergantung tingkat kehadiran dan ketercapaian kinerja masing-masing ASN Bappeda.

3.3 Capaian Kinerja Program dan Kegiatan tahun 2016 dibandingkan dengan Renstra

Capaian kinerja tahun 2016 berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan target kinerja Renstra tahun 2015-2019 apabila dilihat per Program dan Kegiatan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Terpenuhinya pelayanan administarasi perkantoran	100%	100%	100
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tercapainya Kebutuhan Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	100
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya Administrasi Keuangan	12 Bulan	12 Bulan	100
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor	12 Bulan	12 Bulan	100
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Terpenuhinya jasa perbaikan alat kantor	100%	100%	100
Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	12 Bulan	100
Penyediaan barang cetakan dan	Tersedianya cetakan dan penggandaan berupa	31 Buku	31 Buku	100



PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
penggandaan	Buku masuk/keluar, Buku BA Barang			
Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya alat-alat rumah tangga	12 Bulan	12 Bulan	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Bahan-bahan Bacaan Bappeda Provinsi	12 Bulan	12 Bulan	100
Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makan dan minum harian, rapat dan tamu kantor Bappeda	12 Bulan	12 Bulan	100
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersediannya Pembayaran Tenaga Kontrak Kantor Bappeda Provinsi Lampung	9 Orang	9 Orang	100
Penyediaan jasa keamanan kantor dan rumah jabatan	Terpenuhinya jasa keamanan kantor	6 Orang	6 Orang	100
Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD	Tercapaian Laporan Keuangan secara Online	1 Dok	1 Dok	100
Penatausahaan Aset	Tersusunnya data Inventaris barang berupa Dokumen KIR, KIB, Daftar Inventaris Barang, Penghapusan Barang, dan Sensus Barang	5 Dok	5 Dok	100
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke dalam daerah dan ke luar daerah	45 Kali	45 Kali	100
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	100 %	100 %	100
Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	Terpenuhinya pengadaan sarana kantor	100%	100%	100
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	100%	100%	100
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tercapainya Perawatan Kendaraan Dinas secara rutin dan berkala	20 Buah	20 Buah	100
Peningkatan fasilitas gedung kantor	Tersedianya fasilitas kantor Bappeda Provinsi Lampung	100 %	100 %	100
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100 %	100 %	100
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapan	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas pegawai Bappeda Provinsi Lampung	130 Stel	130 Stel	100
PROGRAM	Persentase Peningkatan	100 %	100 %	100



PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Kapasitas Sumber Daya Aparatur			
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Terlaksananya Bimbingan Teknis pendidikan aparatur	50 Orang	50 Orang	100
Evaluasi Pengembangan Budaya Kerja	Terpenuhinya laporan evaluasi pengembangan budaya kerja, pembinaan kinerja aparatur serta sosialisasi kinerja aparatur	1 Dok, 4 kali rapat, 1 kali	1 Dok, 4 kali rapat, 1 kali	100
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/ INFORMASI	Terbangunnya sistem data/informasi pembangunan daerah	100 %	100 %	90,75
Pembangunan Database Metadata Spasial	Terlaksananya koordinasi ke Pemerintah pusat dan Kab/ Kota, terpenuhinya jumlah peserta pelatihan Drone	17 Kali, 10 Orang	9 Kali, 10 Orang	77,27
Pengelolaan Informasi Elektronik dan Perpustakaan Bappeda Provinsi Lampung	Updating website dan data penunjang, terlaksananya koordinasi ke Pusat	1 Kali, 3 Kali	1 Kali, 3 Kali	100
Penyusunan bahan Publikasi Profil Pembangunan Provinsi Lampung	Tersediannya bahan publikasi profil pembangunan Provinsi Lampung	3 Panel display data, 100 buku saku profil Lampung	3 Panel display data, 100 buku saku profil Lampung	100
Pengelolaan Simpul Jaringan Data Spasial Nasional	Kelancaran akses arus data pada jaringan informasi geospasial Nasional	1 Tahun, 1 Paket, 17 Rapat	1 Tahun, 1 Paket, 9 Rapat	86,79
Padu serasi informasi geospasial Provinsi Lampung	Terlaksananya Rapat Koordinasi terkait informasi Geospasial	17 Rapat	11 Rapat	65
Penyusunan Data Indikator Kinerja Pemerintah Daerah	Tersedianya buku indikator kinerja Pemerintah, buku lampung dalam angka tahun 2015	75 buku DIKP, 25 buku LDA	75 buku DIKP, 25 buku LDA	100
Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional (Siskurtanas)	Updating data Siskurtanas Provinsi Lampung	1 dok (8 gatra)	1 dok (8 gatra)	100
Koordinasi Data dan Informasi Pembangunan Daerah	Terisinya data sistem informasi pembangunan daerah secara online (SIPD-online)	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100
Penyusunan Data Indikator Utama Ekonomi Makro dan Keuangan Daerah Provinsi Lampung	Buku Statistik ekonomi makro Provinsi Lampung	120 Buku	120 Buku	100



PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Koordinasi Pengelolaan data dan informasi geospasial Provinsi Lampung	Terlaksananya Rapat ke Pemerintah Pusat dan Kab/ Kota, terpenuhinya pelatihan pengelolaan data	19 Rapat, 25 Orang	15 Rapat, 25 Orang	87,73
PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Persentase Pemenuhan koordinasi dan dokumen Tata Ruang	100 %	100 %	100
Penyusunan dan Legalisasi RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang Wilayah (RTRKS/RDTR/KSCT) Provinsi Lampung	Terevaluasinya revisi Dokumen RTRW Tahun 2009-2029 dan terlaksananya konsultasi publik	2 Dok	2 Dok	100
Fasilitasi dan koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD)	Koordinasi dan konsolidasi BKPRD Prov. Lampung	1 Dok	1 Dok	100
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pemenuhan Koordinasi pembangunan Regional Sumatera.	100 %	100 %	100
Rapat Koordinasi Gubernur se Wilayah Sumatera	Pelaksanaan rapat koordinasi Gubernur se-Wilayah Sumatera	1 Kali	1 Kali	100
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Peningkatan Kapasitas kelembagaan perencanaan	100 %	100 %	100
Pembinaan SDM Aparatur	Terlaksananya aktifitas olahraga dan ceramah agama sebagai sarana pembinaan pegawai Bappeda Provinsi Lampung	48 Kali, 54 Kali	48 Kali, 54 Kali	100
Sosialisasi dan Publikasi Perencanaan Pembangunan	Terpenuhinya sosialisasi dan publikasi bidang Perencanaan Pembangunan			
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUNAN	Persentase Pelaksanaan Perencanaan Daerah dan Bappeda Sesuai Dengan Perundang-undangan	100%	100%	91,67
Forum Gabungan SKPD dan Musrenbang Provinsi	Pelaksanaan forum gabungan SKPD dan pelaksanaan Musrenbang Provinsi	2 Kali	2 Kali	100
Penyusunan RKPDP 2016	Dokumen RKPDP Provinsi Lampung	2 Dok	2 Dok	100
Rapat koordinasi dan	Mengakomodasi	5 Kali,	5 Kali, 7	100



PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
konsultasi perencanaan	sinkronnya Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah dan Koordinasi bidang perencanaan	7 Kali	Kali	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Bappeda Provinsi Lampung	Tersusunnya Dokumen Renja, PPAS, RKA, dan DPA Bappeda	3 Dok	3 Dok	100
Informasi Perencanaan Pembangunan Terpadu (IPPT)	Terlaksananya informasi perencanaan pembangunan terpadu (pameran pembangunan)	1 Kali	-	0
Fasilitasi pelaksanaan Musrenbang kab/kota	Terlaksananya Musrenbang Kab/Kota se-Prov. Lampung	15 Kab/ Kota	15 Kab/ Kota	100
Pembangunan dan Pengembangan Sistem Perencanaan Online	Terpeliharanya dan updating sistem perencanaan pembangunan daerah (SIPPD) Provinsi Lampung	1 Tahun	1 Tahun	100
Penyusunan Dokumen Rencana Anggaran (KUA/PPAS dan PRA RKA APBD P 2016-2017)	Dokumen KUA/PPAS APBD P 2016-2017	2 Dok KUA 2016, 2 Dok PPAS 2016	2 Dok KUA 2016, 2 Dok PPAS 2016	100
Workshop Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya workshop perencanaan pembangunan Daerah	1 Kali	1 Kali	100
Pembinaan Penyusunan RKPD Kab/Kota	Terlaksananya pembinaan RKPD Kab/Kota	15 Kab/ Kota	15 Kab/ Kota	100
Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen pemetaan masalah, potensi, agenda strategis pembangunan daerah serta pengendalian dan evaluasi program-program unggulan	2 Dok	2 Dok	100
Fasilitasi kegiatan Musrenbang Nasional	Partisipasi Prov.Lampung dalam rangkaian kegiatan Musrenbang Nasional tahun 2016	1 Kali	1 Kali	100
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN	Persentase Peningkatan Kapasitas kelembagaan	100 %	100 %	100
Sosialisasi dan Publikasi Perencanaan Pembangunan	Terpenuhinya publikasi kegiatan Bappeda berupa Advertorial, Iklan Media Cetak, Liputan, Banner, Bunga Papan, Papan Billboard	2 Kali, 5 Iklan, 1 Liputan, 12 Buah, 14 Buah, 1 Buah	2 Kali, 5 Iklan, 1 Liputan, 12 Buah, 14 Buah, 1 Buah	100
PENGUATAN JARINGAN DAN PROGRAM KOORDINASI PERENCANAAN	Persentase Pelaksanaan Penguatan Jaringan dan Koordinasi Perencanaan	100%	100%	99,12
Koordinasi perencanaan	Koordinasi dan fasilitasi	80 Kali	80 Kali	100



PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
pengembangan ekonomi daerah Provinsi Lampung	perencanaan pengembangan ekonomi daerah dalam rangka sinergi pusat, daerah dan Kab/Kota			
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Kesra	Jumlah pelaksanaan koordinasi perencanaan bidang Pemerintahan dan Kesra	13 kali Kab/Kota 7 kali Pusat	13 kali Kab/Kota 7 kali Pusat	100
Koordinasi Perencanaan Pendanaan dan Pembiayaan Pembangunan daerah	Terlaksananya koordinasi perencanaan pendanaan dan pembiayaan pembangunan Daerah serta Dokumen Kerangka Pembiayaan Kawasan Pasar Seni Enggal	1 Kali, 1 Dok	1 Kali, 1 Dok	100
Koordinasi Perencanaan Prastwil, Tata Ruang dan LH	Tersedianya Dokumen Laporan Koordinasi, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengembangan wilayah	1 Dok	1 Dok	100
Promosi Informasi Perencanaan Investasi Daerah	Keikutsertaan Prov.Lampung pada IIICE 2016 dan RGC 2016, Pembuatan bahan/materi promosi investasi daerah dan daya saing produk pertanian	2 Kali, 1 Event	2 Kali, 1 Event	100
Koordinasi dan asistensi pemanfaatan dana pajak rokok	Terlaksananya koordinasi dan asistensi pemanfaatan dana pajak rokok	15 Kab/ Kota	15 Kab/ Kota	100
Koordinasi Rencana Aksi Daerah tentang penurunan Gas Rumah Kaca dan antisipasi dampak perubahan iklim dan Monev lahan kritis (Koordinasi dan Monev LH)	Tersedianya dokumen Laporan kegiatan pendukung penguatan kelembagaan pengelolaan irigasi Provinsi Lampung	1 Dok	1 Dok	100
Penunjang Program Pengelolaan Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi (WISMP-II) Provinsi Lampung	Tersedianya dokumen program/kegiatan pengelolaan sektor sumber daya air dan irigasi	1 Dok	1 Dok	100
Penguatan Kelembagaan Pengelolaan Sektor Sumber Daya Air dan Irigasi Provinsi Lampung	Terlaksananya penguatan kelembagaan pengelolaan irigasi dalam rangka meningkatkan hasil produksi pertanian	1 Rapat	1 Rapat	100
Fasilitasi kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL, Koordinasi Kawasan	Terlaksananya rapat Koordinasi dan konsultasi AMPL di Kab/Kota se- Provinsi Lampung	5 Rapat	4 Rapat	88,62



PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Kumuh/Tertinggal, Perumahan serta Pemukiman				
Fasilitasi percepatan pelaksanaan program unggulan daerah bidang infrastruktur	Tersedianya laporan pelaksanaan program unggulan daerah bidang infrastruktur di Provinsi Lampung	1 Dok	1 Dok	100
Koordinasi Monitoring pelaporan dan evaluasi Bidang Pengendalian	Terlaksananya koordinasi dan monitoring pelaporan dan evaluasi bidang pengendalian	15 Kab/ Kota	15 Kab/ Kota	100
Fasilitasi Sekretariat Tim Penganggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Lampung	Tersusunnya dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan daerah Provinsi Lampung	1 Dok	1 Dok	100
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN FASILITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat fasilitasi kebijakan daerah	100%	100%	100
Fasilitasi dan koordinasi Pemanfaatan anggaran DBHCHT untuk pengembangan sektor Perkebunan	Terlaksananya rapat koordinasi DBHCHT sektor perkebunan	3 Kali	3 Kali	100
Fasilitasi Percepatan Pengembangan Kawasan Industri dan Pariwisata	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pengembangan kawasan industri dan pariwisata di Provinsi Lampung	10 Kali	10 Kali	100
Fasilitasi dan koordinasi kedaulatan pangan dan peralihan kewenangan bidang energi dan kemaritiman	Sinergitas program dan kegiatan lingkup produksi	10 Kali	10 Kali	100
Fasilitasi dan Koordinasi Program Pembangunan Mendukung Kedaulatan Pangan dan energi	Sinergitas program dan kegiatan lingkup produksi	10 Kali	10 Kali	100
Fasilitasi Pengembangan Dunia Usaha dan Sinergitas Pembangunan Ekonomi Daerah	Sinergitas program dan pengembangan dunia usaha dan pengembangan ekonomi daerah	2 Kali	2 Kali	100
Fasilitasi Analisis Kebijakan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat.	Tersusunnya dokumen hasil analisis kebijakan pembangunan daerah bidang pemerintah dan kesejahteraan masyarakat	2 Dok	2 Dok	100
Penyusunan Road Map Peningkatan IPM Provinsi Lampung	Terlaksananya rapat koordinasi dalam penyusunan Road Map IPM	3 Kali	3 Kali	100



PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
PROGRAM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen/sistem informasi pengendalian dan evaluasi program pembangunan Provinsi	100%	100%	100
Evaluasi hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Tahunan SKPD Prov.Lampung	Tersedianya dokumen tingkat pencapaian kinerja SKPD Provinsi Lampung terhadap RPJMD Provinsi Lampung	2 Dok	2 Dok	100
Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda	Tersedianya dokumen capaian kinerja Bappeda selama 1 (satu) tahun	1 Dok	1 Dok	100
Penyusunan Laporan Pasca-MDGs provinsi Lampung 2011-2015 akhir capaian	Tersusunnya Dokumen laporan pencapaian target pasca MDG's	1 Dok	1 Dok	100
Peningkatan, pengendalian, monitoring dan pelaporan pelaksanaan pembangunan APBN (DK/TP/TA. 2015-2019)	Daftar program/kegiatan APBN tahun 2016, laporan konsolidasi pelaksanaan program APBN (Dk/TP) TA 2016, pemantauan pelaksanaan program APBN (DK/TP/UB) rapat koordinasi APBN (DK/TP/UB) 2016	30 Dok	30 Dok	100
Fasilitasi dan Pembinaan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD Kab/Kota	Jumlah fasilitasi, pelaksanaan penilaian APN dan evaluasi RPJMD 8 Kab/ Kota	15 Kab/ Kota, 8 Dok	15 Kab/ Kota, 8 Dok	100
Peningkatan, pengendalian, monitoring dan pelaporan pelaksanaan pembangunan APBD TA 2016	Daftar lokasi program/kegiatan APBD, tahun 2016, daftar persandingan pagu dan lokasi kegiatan APBD dan APBN Ta. 2016 pemantauan pelaksanaan program APBD ta. 2016 rapat APBD ta 2016	3 Dok	3 Dok	100
Koordinasi dan Evaluasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Tersusunnya dokumen pencegahan korupsi dan reformasi birokrasi	2 Dok	2 Dok	100
Evaluasi hasil pencapaian renstra & renja bappeda	Tersusunnya dokumen tingkat pencapaian kinerja Bappeda tahun 2016	2 Dok	2 Dok	100
PROGRAM PENGEMBANGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah dan analisis kebijakan bidang pembangunan ekonomi, bidang infrastruktur SDA dan pelestarian lingkungan	100%	100%	100



PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	hidup, bidang kesejahteraan rakyat serta bidang penegakan supremasi hukum.			
Fasilitasi penyalarsan RPJMN dan integrasi Undang-undang 23 tahun 2014 kedalam RPJMD Prov. Lampung 2015-2019	Tersedianya Dokumen revisi RPJMD Provinsi Lampung tahun 2015-2019	1 Dok	1 Dok	100
Penyusunan Studi Pendahuluan Rencana Kerja Kemitraan Pembiayaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota	Dokumen kajian rencana kerja kemitraan pembiayaan antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kab/Kota, Dokumen FS pinjaman daerah dan Kajian Kawasan Strategis Bakauheni	2 Dok	2 Dok	100
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pasca MDGs (SDGs)	Terlaksananya rapat koordinasi perencanaan MDG's	2 Kali	2 Kali	100
Penyusunan RAD Pangan dan Gizi 2015-2019	Tersusunnya Dokumen RAD pangan dan gizi 2015-2019	1 Dok	1 Dok	100
Program Penyusunan Grand Design Kependudukan Provinsi Lampung	Tersusunnya Dokumen grand design kependudukan provinsi lampung	1 Dok	1 Dok	100
Penyusunan Studi Pendahuluan Proyek Infrastruktur Untuk Kerjasama Pemerintah dan Swasta	Tersusunnya dokumen studi lanjutan proyek infrastruktur untu kerjasama Pemerintah dan Swasta	3 Dok	3 Dok	100

3.4 Belanja Tidak Langsung

Belanja pegawai merupakan belanja dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang - undang, pada Tahun Anggaran 2016 Bappeda Provinsi Lampung menganggarkan belanja tidak langsung sebesar Rp. 11.505.164.000,00 dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp. 11.133.428.061,00 atau 96,77% yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Pagu dan Realisasi Belanja Tidak Langsung TA. 2016



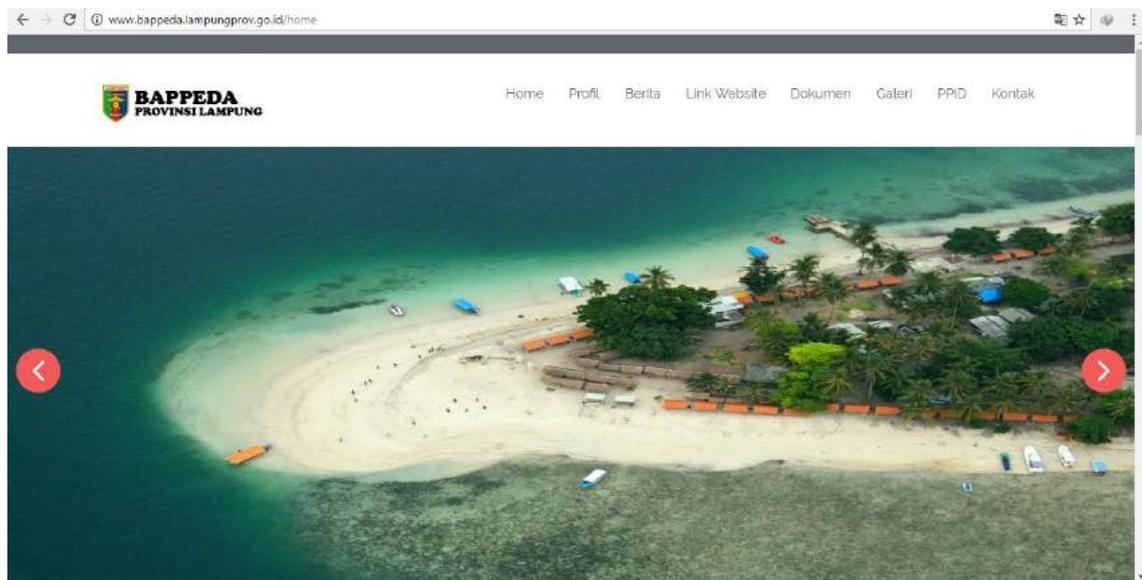
URAIAN		PAGU (Rp)	REALISASI	(%)
BELANJA TIDAK LANGSUNG		11.505.164.000	11.133.428.061	96,77
I	Gaji dan Tunjangan	6.896.231.000	6.755.170.936	97,96
1.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	5.458.794.600	5.391.762.740	98,78
2.	Tunjangan Keluarga	514.477.600	472.310.440	91,80
3.	Tunjangan Jabatan	305.060.000	302.170.000	99,05
4.	Tunjangan Fungsional	36.400.000	36.400.000	100
5.	Tunjangan Umum dan Tambahan Tunjangan Umum	225.225.000	211.120.000	93,73
6.	Tunjangan Beras	308.509.200	298.660.080	96,80
7.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	46.455.570	42.675.792	91,86
8.	Pembulatan Gaji	1.309.030	71.884	5,49
II	Tambahan Penghasilan PNS	4.608.933.000	4.378.257.125	94,99
1.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya	4.608.933.000	4.378.257.125	94,99

<i>Program</i>	<i>Persentase Capaian Rata-rata</i>	<i>Kategori Capaian</i>
1. Gaji dan Tunjangan	97,96 %	Baik
2. Tambahan Penghasilan	94,99 %	Baik

Dari beberapa capaian serapan anggaran belanja tidak langsung pada kegiatan Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016, dapat dihimpun penilaian kategori capaian sebagai berikut:

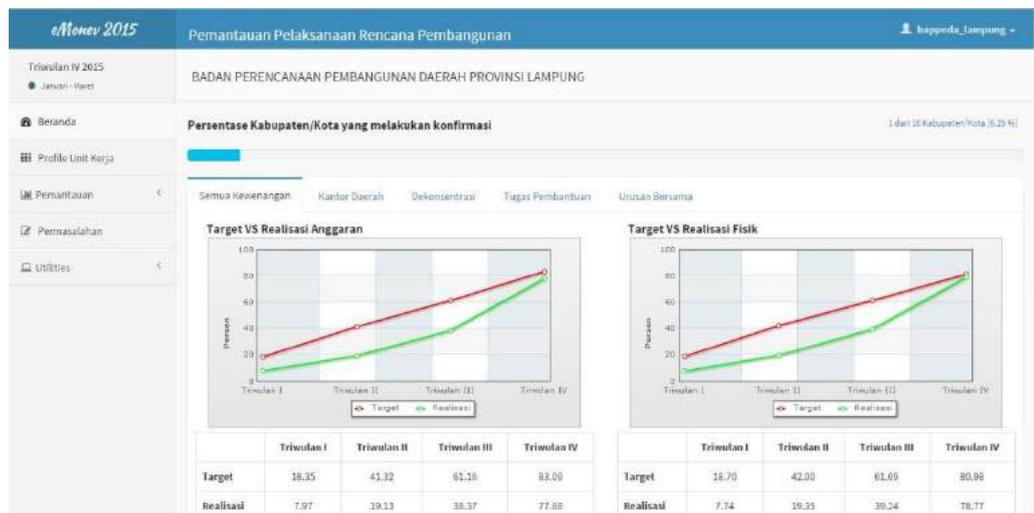
Dalam pencapaian informasi sebagai salah satu bentuk layanan informasi kepada masyarakat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bappeda membangun sistem informasi antara lain :

1. Sistem Informasi Perencanaan (<http://bappeda.lampungprov.go.id>) yang berfungsi sebagai pendukung perencanaan pembangunan daerah. Sistem Informasi Perencanaan dikembangkan untuk menunjang pelaksanaan perencanaan agar proses perencanaan menjadi lebih terintegrasi, transparan, dan akuntabel dimulai dari proses pengusulan sampai dengan ditetapkannya KUA PPAS;



Gambar 3.7 Website Bappeda Provinsi Lampung

2. Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan (SI-Monev terdiri dari E-Sakip, Monev APBD, Monev APBN, ROPK, Penilaian Kinerja). Sistem Informasi Monev dikembangkan untuk mempermudah SKPD dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan dan penilaian kinerja setiap SKPD. Sedangkan bagi Bappeda Provinsi Lampung selaku fungsi pengendalian, sistem ini sangat mendukung dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi dapat lebih mudah dilakukan secara transparan dan akuntabel;



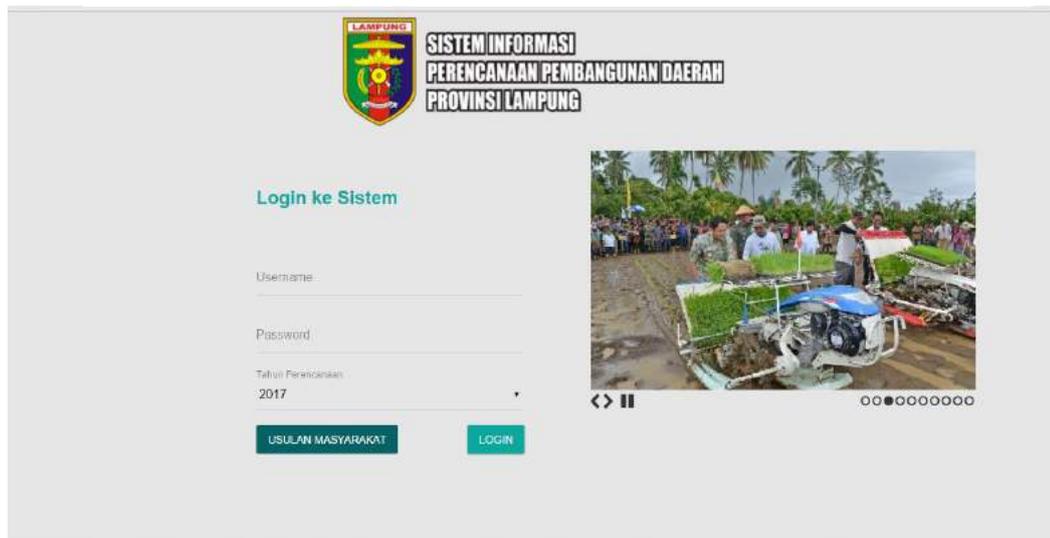
Gambar 3.8 Aplikasi E-Monev Bappeda Provinsi Lampung

3. Sistem Informasi Metadata Spasial Daerah (MDS), Sistem Informasi MDS berfungsi untuk memberikan informasi data spasial daerah yang dimiliki Pemerintah Provinsi Lampung secara umum sesuai dengan arah kebijakan Badan Informasi Geospasial. Sistem ini juga berfungsi sebagai media untuk berbagi data spasial antar pengguna sistem;



Gambar 3.9 Website Metadata Spasial Daerah

4. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD) Provinsi Lampung dengan alamat web www.sippd.lampungprov.go.id berfungsi mengintegrasikan perencanaan jangka menengah (RPJMD, Renstra SKPD) dengan perencanaan kegiatan tahunan (Musrenbang, RKPD) dan penganggaran (KUA/PPAS).



Gambar 3.10 Web Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah



BAB IV

HAMBATAN DAN KENDALA SERTA TINDAK LANJUT

4.1 Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Kegiatan Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016

Beberapa hambatan/permasalahan yang dihadapi Bappeda Provinsi Lampung selama tahun 2016 dalam melaksanakan Program dan kegiatan untuk mendukung Tugas Pokok dan Fungsi dan dalam rangka pencapaian sasaran strategis Renstra dapat diuraikan sbb :

- 1) Kurangnya konsistensi SKPD dalam penyusunan perencanaan pembangunan (Indikator Kinerja dan target program kegiatan) antara dokumen RPJMD, RKPD, Renja dan RKA serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehingga sulit untuk dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah sesuai amanat Permendagri nomor 54 Tahun 2010.
- 2) Belum sesuai dan serasinya program pemerintah pusat dengan potensi dan kebutuhan lokal daerah sementara itu perencanaan Anggaran Daerah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan lokal di daerah.
- 3) Masih kurangnya koordinasi antar Provinsi dan Kabupaten/kota sehingga belum terwujudnya sinergisitas antara program dan kegiatan pembangunan Provinsi dengan program/kegiatan pembangunan kabupaten/Kota.

4.2 Tindak Lanjut Permasalahan dan Hambatan Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016

Pada Tahun 2016, Bappeda Provinsi Lampung telah melakukan berbagai upaya peningkatan program dan kegiatan dengan tahapan persiapan yang lebih baik. Diharapkan program dan kegiatan pada Bappeda Provinsi



Lampung pada Tahun 2017 dapat menjadi tindak lanjut beberapa kekurangan yang terjadi pada Tahun 2016.

Adapun tindak lanjut yang telah dilaksanakan antara lain :

- a. Melakukan perencanaan kinerja dan penetapan kinerja tahunan lebih baik melalui proses yang melibatkan seluruh komponen Bappeda Provinsi Lampung
- b. Menyusun Rencana Aksi Kinerja Bappeda Tahun 2017 sebagaimana arahan/rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara pada saat evaluasi Laporan Kinerja tahun 2015.
- c. Pengembangan aplikasi Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang dapat menampung usulan – usulan masyarakat secara online.
- d. Pelaporan kinerja menyajikan informasi faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi capaian kinerja, dan sebagai upaya untuk tindak lanjut. Sistem Monitoring dan Evaluasi direncanakan ke depan juga akan dikembangkan melalui aplikasi sehingga perkembangan dan evaluasi hasil program dan kegiatan dapat diketahui secara online.
- e. Melaksanakan evaluasi internal yang dipimpin langsung oleh Kepala Bappeda Provinsi Lampung secara rutin.



BAB V PENUTUP

Laporan Evaluasi Rencana Kerja SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung merupakan perwujudan pertanggungjawaban Kepala Bappeda Provinsi Lampung atas capaian pelaksanaan Penetapan Kinerja (PK). Selain sebagai pertanggungjawaban kepada Gubernur Lampung, penyusunan Evaluasi Hasil Rencana Kerja Bappeda Provinsi Lampung juga dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat maupun pemangku kepentingan (stakeholder) dalam hal pelaksanaan fungsi perencanaan pembangunan di Provinsi Lampung. Substansi Evaluasi Rencana Kerja Bappeda Provinsi Lampung Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016 secara umum menyampaikan informasi sebagai berikut:

- f. Program dan Kegiatan Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016
- g. Kesesuaian Program dan Kegiatan Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016 dengan Renstra Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2015-2019
- h. Capaian Kinerja Keuangan dan Kinerja Output Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016
- i. Hambatan dan Kendala

Secara umum capaian kinerja Bappeda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 telah tercapai dengan baik dan tidak ditemukan hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya. Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan- permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kinerja Bappeda Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peran pejabat fungsional perencana dan pejabat fungsional peneliti dalam melakukan analisis-analisis yang diperlukan dalam penyusunan dokumen-dokumen kinerja;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi yang ada di Bappeda Provinsi Lampung, terkait dengan penyusunan dokumen kinerja.



Demikian Dokumen Evaluasi Hasil Rencana Kerja Bappeda Provinsi Lampung Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2016 ini dibuat, dengan harapan dapat menjadi informasi yang bermanfaat baik dalam penilaian kinerja Bappeda Provinsi Lampung maupun untuk pertimbangan perumusan kebijakan dan program yang lebih terarah dan terpadu pada tahun anggaran yang akan datang.



